KLIPPING BERITA MEDIA MASSA

KAMIS, 11 FEBRUARI 2016

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran – Investor Daily	Kamis, 11 Februari 2016	Pemerintah Siapkan Enam Wilayah Strategis di Sumatera	Pemerintah menyiapkan enam wilayah pengembangan strategis di Pulau Sumatera. Ke enam WPS tersebut merupakan penekanan dalam pengembangan infrastruktur di pulau tersebut. Dengan adanya enam WPS tersebut, wilayah strategis dapat disinergikan dan dirancang agar sesuai dengan kapasitas yang ada.
2	Koran SINDO (halaman 5)	Kamis, 11 Februari 2016	BKN Blokir 93.721 PNS	Badan Kepegawaian Negara memblokir 93.721 PNS karena tidak melaksanakan instruksi untuk melakukan pendataan ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS). Layanan kepegawaian ditutup untuk PNS sejumlah tersebut yang hingga tanggal 31 Januari 2016 tidak melakukan registrasi. Dengan ditutupnya layanan tersebut, PNS yang bersangkutan tidak akan dapat melakukan proses kenaikan pangkat, mutase, dan hal-hal lain yang menyangkut urusan kepegawaian. Namun anggota Komisi III DPR menyatakan BKN tidak perlu buru-buru. Perlu dilakukan konfirmasi ulang kepada jumlah tersebut tentang penyebabnya.
3	Koran SINDO (Halaman 16)	Kamis, 11 Februari 2016	Renovasi Infrastruktur Asian Games Butuh Rp. 2 Triliun	Renovasi fasilitas ajang olahraga Asian Games Ke-18 pada 2018 diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp. 2 triliun. Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengatakan perkiraan kebutuhan anggaran tersebut berasal dari anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga, APBN, serta kementerian PUPR.
4	Koran – SINDO (Halaman 17)	Kamis, 11 Februari 2016	Skema KPS Butuh Penyempurnaan	Peran swasta amat dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan negeri ini, mengingat kebutuhan dananya dalam lima tahun ke depan mencapai lebih dari Rp. 5000 triliun. Namun hingga kini skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS) yang ditawarkan pemerintah terbukti masih sulit menarik investor swasta.
5	Investor Daily (Halaman 1 dan 11)	Kamis, 11 Februari 2016	30 Proyek Infrastruktur Rp. 851 Triliun Jadi Prioritas	Pemerintah melalui komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menetapkan 30 proyek infrastruktur senilai Rp. 851 triliun sebagai proyek prioritas periode 2016-2019. 30 proyek tersebut mendapat jaminan politik, perizinan, dan finansial yang tertuang dalam Perpres No. 3/ 2016. Kemudahan dan jaminan itu dituangkan dalam Inpres No. 1/2016. Kemudahan itu antara lain tentang proses perizinan dan pembebeasan tanah. Sedangkan jaminan politik misalnya konsistensi kebijakan pemerintah dan jaminan kemudahan perizinan dan jaminan finansial dari APBN. 30 proyek terpilih tersebut dipilih karena dapat menimbulkan efek *pengganda (multifier effect)* bagi masyarakat di bidang ekonomi.
6	Media Indonesia (Halaman	Kamis, 11 Februari 2016	30 Proyek Infrastruktur dikawal Ketat	Pemerintah mengakui oenggarapan proyek-proyek infrastruktur belum optimal, oleh karena itu 30 proyek infrastruktur dari 225 proyek strategis nasional dimasukkan

	17)			ke pengawasan Komiter Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) 2015-2019. Saat ini banyak factor yang memperlambat implementasi proyek di lapangan, oleh karena itu dengan adanya KPPIP, aral yang melintang dalam proses pengadaan proyek diharapkan dapat diatasi.
7	Investor Daily	Kamis, 11 Februari 2016	Renovasi GBK butuh 2 Triliun	Renovasi kompleks Gelora Bung Karno dalam rangka Asian Games (18 Agustus-2 September 2018) diperkirakan mencapai 2 triliun. Renovasi akan dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya. Namun, pemerintah masih melakukan kanjian mendlam untuk merenovasi kompleks bersejarah tersebut. Kementerian PUPR juga akan menggandeng Ikatan Arsitekk Indonesia (IAI) dalam proses perancangannya.
8	Kompas (Halaman 18)	Kamis, 11 Februari 2016	Pemerintah Tetapkan Tujuh Isu Strategis dalam Peta Jalan	Pemerintah menetapkan tujuh isu strategis pada peta jalan perdanganan secara elektronik (e-dagang), yaitu logistic, pendanaan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, pajak, pendidikan, dan kemanan siber. Dalam isu pendanaan , disepakati pembentukan badan layanan umum yang dapat menyalurkan hibah atau subsidi pemerintah, optimalisasi skema kredit usaha rakyat (KUR), dan penyertaan modal ventura.
9	Republika (Halaman 15)	Kamis, 11 Februari 2016	Kereta Cepat Bukan Prioritas	Kepala BAPPENAS menyatakan bahwa proyek kereta api Jakarta-Bandung tidak masuk dalam 30 proyek prioritas yang diusung pemerintah. Bahkan proyek ini hanya menjadi satu dari 225 proyek strategis nasional. Namun demikian pengerjaannya tetap diutamakan, mengintag groundbreaking yang telah menelan biaya besar telah dihelat Januari silam. Sampai saat ini belum ada permasalahan yang bisa menghambat pengerjaan proyek ini, namun ada beberapa hal dari regulator yang mesti diselesaikan.
10	Koran Tempo (Halaman 13)	Kamis, 11 Februari 2016	TOD Kereta Cepat Tunggu Rencana Induk	PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) sedang menyiapkan rencana induk pengembangan empat kawasan terpadu transportasi massal (*transit oriented development/TOD*) di sepanjang jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembuatan rencana induk tersebut dilakukan oleh konsultan. Setelah rencana induk rampung, barulah kawasan kawasan tersebut dapat digarap oleh KCIC.
11	Kompas (Halaman 8)	Kamis, 11 Februari 2016	GBK tak Dirombak Total	Mepetnya waktu persiapan Asian Games Jakarta-Palembang 2018 menjadi tantangan bagi pembangunan infrastruktur oleharaga dan sarana pendukungnya. Dalam waktu sekitar setahun, renovasi 14 arena di kawasan Gelora Bung Karno akan disesuaikan dengan waktu yang ada.
12	Tempo (Halaman	Kamis, 11 Februari	Pemerintah Prioritaskan 30	Pemerintah menetapkan 30 proyek infrastruktur prioritas. Penentuan ini adalah hasil diskusi dari

	15)	2016	Proyek Infrastruktur	seluruh kementerian dan lembaga negara. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan menjadi pengawas jalannya 30 proyek prioritas tersebut.
13	Kompas (Halaman 17)	Kamis, 11 Februari 2016	Paripurna RPJMN dan Investasi	Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnadi, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan berbincang sebelum siding paripurna di Istana Negara. Sidang cabinet tersebut membahs penyusunan rencana kerja pemerintah, percepatan integrase RPJMN dan Daftar Negatif Investasi.
14	Kompas (Halaman 26)	Kamis, 11 Februari 2016	Ruang Hijau Kurang, Picu Masalah Kota	Luas Ruang terbuka hijau di Jakarta masih dibawah ketentuan UU Penataan Ruang yaitu sebesar 30%. Minimnya RTH menuai problem social, mental, dan fisik warga.
15	Media Indonesia (Halaman 24)	Kamis, 11 Februari 2016	Jalur Pantura Rusak	Hujan terus menerus dan tonase truk yang melebihi kapasitas mengakibatkan sebagian jalur Pantura-Indramayu
16	Investor Daily	Kamis, 11 Februari 2016	Pemerintah Segera Bebaskan Lahan KA Papua	Pemerintah akan memulai pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan jalur kereta api di Papua tahun ini. Kemenhub akan mengajukan tambahan dana melalui usulan RAPBN-P 2016 sebesar 10 Miliar untuk pembebasan lahan tersebut.
17	Kompas (Halaman 14)	Kamis, 11 Februari 2016	BPPT: Insinerator Pilihan Akhir	BPPT menilai penggunaan insinerator adalah suatu hal yang tak dapat dielakkan, karena volume sampah sudah terlalu besar dan harus dikurangi. Penggunaan teknologi termal (pembakaran) termasuk incinerator, adalah langkah pragmatis yang sangat diperlukan dalam situasi kritis penuh sampah. Namun upaya pengurangan sampah dari hulu harus tetap dilakukan, mengingat incinerator hanyalah upaya di hilir.
18	Kompas (Halaman 27)	Kamis, 11 Februari 2016	Penulisan Tak Lazim, Lawang Suryakancana Diresmikan	Lawang suryakancana yang merupakan gerbang kawasan pecinan (tionghoa) di bogor diresmikan. Ada nama yang tak lazim di gerbang tersebut karena di gerbang tersebut dicantumkan tulisan: Lawang Suryakancana, Kampung tengah, Buitenzorg, Dayeuh Bogor. Penulisan itu merupakan kesepakatan antara komunitas tionghoa, budayawan bogor dan unsur pemerintah. Namun menurut walikota Bogor , kritik terhadap penulisan nama tersebut dapat didiskusikan dan berkemungkinan untuk dirubah. Pemerintah Bogor juga akan menata kawasan pusaka lainnya setelah Lawang Suryakancana ini, yaitu misalnya Kelurahan Empang yang bercirikan hunian warga keturunan Timur Tengah.

19	Media Indonesia (Halaman 5)	Kamis, 11 Februari 2016	Bangun Papua dengan Pendekatan Adat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT), menggelar rapat koordinasi percepatan pembangunan Papua berbasis adat.
20	Media Indonesia (Halaman 25)	Kamis, 11 Februari 2016	Bencana Masih Intai Daerah	Curah hujan yang tinggi, air laut pasang, longsor, tanggul jebol, masih menjadi ancaman bencana bagi masyarakat. Ancaman bencana juga masih mengintai masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
21	Media Indonesia (Halaman 24)	Kamis, 11 Februari 2016	Rel Belum Tiba di Makassar	Pembangunan jalur Kereta api trans Sulawesi tahun ini masih pada tahap pembangunan konstruksi jalur Barru-Parepare. Pembebasan lahan akan dimulai tahun ini.Pembangunan ditargetkan selesai pada 2018 namun bergantung pada ketersediaan dana.
22	Media Indonesia (Halaman 24)	Kamis, 11 Februari 2016	Kemacetan Makin Parah	Kemacetan terlihat di saat jam sibuk di samping pembangunan jalan laying khusus bus transjakarta di koridor ciledug-tendean. Hal itu karena tidak adanya pengatur jalan di area tersebut.

Judul	**Pemerintah Siapkan Enam Wilayah Strategis di Sumatera**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Koran – Investor Daily		
Resume	Pemerintah menyiapkan enam wilayah pengembangan strategis di Pulau Sumatera. Ke enam WPS tersebut merupakan penekanan dalam pengembangan infrastruktur di pulau tersebut. Dengan adanya enam WPS tersebut, wilayah strategis dapat disinergikan dan dirancang agar sesuai dengan kapasitas yang ada.		

Pemerintah Siapkan Enam Wilayah Strategis di Sumatera

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan enam wilayah pengembangan strategis di Pulau Sumatera. Keenam WPS di Sumatera tersebut yakni Sabang-Banda Aceh-Langsa, Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru, Batam-Tanjung Pinang, Sibolga-Padang-Bengkulu, Jambi-Palembang-Pangkal Pinang-Tanjung Pandan, dan Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT).

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hermanto Dardak mengatakan, keenam wilayah pengembangan strategis di Pulau Sumatera itu merupakan penekanan dalam pembangunan infrastruktur di pulau tersebut.

"Dengan begitu, wilayah strategis tersebut dapat disinergikan dan dirancang agar sesuai kapasitas yang ada," ujar dia dalam siaran tertulisnya, Jakarta, Rabu (10/2).

Dia menuturkan, di dalam wilayah pertumbuhan tersebut, terdapat kawasan-kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan, dan terdapat wilayah yang sudah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). "Misalnya, KEK Sei Mangke sebagai salah satu KEK di wilayah Sumatera yang perlu didukung, supaya kita yakinkan kawasan tadi terlayani secara intern sebagai wilayah pertumbuhan," ujarnya.

Konsep WPS di wilayah pertumbuhan tersebut, menurutnya, lebih pada keseimbangan pembangunan seluruh Indonesia, karena yang dilihat adalah wilayah pertumbuhan terpadu, wilayah yang sedang berkembang, dan wilayah pertumbuhan baru. "Ini adalah pendekatan substansi yang dilakukan. Jadi, tidak hanya membangun infrastruktur PUPR terpadu berbasis pengembangan wilayah, tapi juga mengajak sektor-sektor yang lain membangun dengan berbasis kewilayahan sesuai potensinya," tuturnya.

Pembangunan yang dapat disinergikan dengan sektor lain di antaranya adalah di bidang sumber daya air, jalan, bandar udara, kereta api, dan pelabuhan internasional. "Jalan tol di Pulau Sumatera sepanjang 2.700 kilometer dipercepat dan kita bisa melihat sekarang ini program prioritas itu sudah berjalan," kata Hermanto.

Pembangunan jalan tersebut akan mendukung terbentuknya Asian Highway di Sumatera. Jalan tersebut dibangun untuk meningkatkan konektivitas, sehingga diharapkan dapat menjadi tulang punggung (*backbone*) di wilayah pertumbuhan.

Hermanto menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Menko Maritim dan Sumber Daya untuk menyinergikan infrastruktur dengan industri pariwisata. Dari 25 kawasan strategis pariwisata ada 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang menjadi prioritas. Diantaranya adalah Danau Toba Sumatera Utara dan di Tanjung Kelayang Belitung. "Pembangunan infrastruktur kita prioritaskan untuk mendukung pengembangan kawasan pariwisata tersebut," ujar dia. **(eam)**

Judul	**BKN Blokir 93.721 PNS**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Koran – SINDO (Halaman 5)		
Resume	Badan Kepegawaian Negara memblokir 93.721 PNS karena tidak melaksanakan instruksi untuk melakukan pendataan ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS). Layanan kepegawaian ditutup untuk PNS sejumlah tersebut yang hingga tanggal 31 Januari 2016 tidak melakukan registrasi. Dengan ditutupnya layanan tersebut, PNS yang bersangkutan tidak akan dapat melakukan proses kenaikan pangkat, mutase, dan hal-hal lain yang menyangkut urusan kepegawaian. Namun anggota Komisi III DPR menyatakan BKN tidak perlu buru-buru. Perlu dilakukan konfirmasi ulang kepada jumlah tersebut tentang penyebabnya.		

BKN Blokir 93.721 PNS

Tidak Bisa Naik Pangkat atau Mutasi karena Lalai Mendaftar Ulang

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memblokir 93.721 pegawai negeri sipil (PNS) karena tidak melaksanakan instruksi untuk melakukan pendataan ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS).

Ribuan guru honorer melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera mengangkat seluruh guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Kepala Biro Hukum BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, BKN menutup layanan kepegawaian kepada 93.721 PNS itu yang hingga batas terakhir pendataan PNS pada 31 Januari 2016 tidak melakukan registrasi.

"Ditutupnya layanan kepegawaian berarti ke-93.721 PNS tersebut tidak dapat menerima pemrosesan kenaikan pangkat, mutasi dan hal-hal lain yang menyangkut urusan kepegawaian," katanya.

Menurut Tumpak, ini merupakan konsekuensi atas tidak adanya respons atas SE yang telah dikeluarkan kepala BKN. Padahal, e-PUPNS merupakan program nasional menuju terwujudnya basis data kepegawaian yang update, akurat dan tepercaya.

Kebijakan *blocking* layanan kepegawaian juga ditujukan kepada PNS yang pada periode hingga 31 Januari 2016 telah mengajukan permohonan pemrosesan layanan kepegawaian ke BKN, namun tidak melakukan registrasi PUPNS.

Diketahui, *blocking* dilakukan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kepala BKN dengan Nomor K26-30/V 2-1/99 perihal Tindak Lanjut e-PUPNS yang diterbitkan pada 5 Januari 2015 BKN. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa pendaftaran/registrasi susulan e-PUPNS diberikan batas waktu hingga 31 Januari 2016.

Sementara bagi PNS yang sudah melakukan registrasi, namun belum menyelesaikan pengisian e-PUPNS atau belum menyampaikan berkas untuk diverifikasi diberi kesempatan hingga 17 Januari 2016. Bagi instansi yang belum menyelesaikan verifikasi level 1 dan 2 diberi kesempatan perpanjangan hingga 31 Januari 2016.

BKN telah memulai pendataan ulang sejak 1 September-31 Desember 2015. Namun demikian karena masih ada 106.308 PNS yang belum melakukan registrasi, maka BKN memberikan kesempatan sampai 31 Januari 2016.

Berdasarkan rekapitulasi data yang dilakukan unit Pengolahan Data BKN, per 1 Februari 2016, terdata sebanyak 4.460.126 PNS telah melakukan registrasi e-PUPNS atau sebanyak 97,9% dari total PNS di Indonesia yang berjumlah 4.553.847 orang.

Selanjutnya BKN akan lebih berkonsentrasi pada proses verifikasi data PNS yang sudah melakukan registrasi dan update data. Selain itu, BKN akan merekap keseluruhan data informasi kompetensi PNS yang telah tertuang dalam e-PUPNS.

Data tersebut akan digunakan sebagai salah satu acuan penyelenggaraan manajemen kepegawaian berdasarkan sistem merit seperti yang diamanahkan Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, rasa, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan," papar Tumpak.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto mengingatkan agar BKN tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. BKN dinilai perlu melakukan konfirmasi ulang apakah memang 93.721 PNS tersebut tidak ada. "Perlu dilihat lagi apa penyebabnya. Jika terlalu cepat menyimpulkan akibatnya bisa gaduh," katanya.

Politisi PAN menilai penting dilakukan verifikasi faktual karena pendataan ulang ini dilakukan secara elektronik yang berpeluang ada kesalahan. Dia juga meminta BKN melibatkan pihak terkait lainnya dalam melakukan verifikasi. Setelah itu disinkronkan dengan yang ada. Dia menyarankan untuk melibatkan Kemendagri agar kepala daerah juga turut memverifikasi dan tentunya Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Jika memang tidak ada orangnya dan tidak ada protes dari kalangan PNS, perlu ditindaklanjuti mengapa ada data sebanyak itu, tapi tidak ada orangnya. Apakah karena ada unsur kesengajaan, ada yang bermain ataukah memang hanya kesalahan administrasi. "Perlu ditindaklanjuti penegak umum karena ini bagian menata ulang PNS," katanya.

● **dita angga**

Judul	**Renovasi Infrastruktur Asian Games Butuh Rp. 2 Triliun**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Koran – SINDO (Halaman 16)		
Resume	Renovasi fasilitas ajang olahraga Asian Games Ke-18 pada 2018 diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp. 2 triliun. Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengatakan perkiraan kebutuhan anggaran tersebut berasal dari anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga, APBN, serta kementerian PUPR.		

Renovasi Infrastruktur Asian Games Butuh Rp2 Triliun

JAKARTA – Renovasi fasilitas ajang olahraga Asian Games Ke-18 pada 2018 diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp2 triliun. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Adjar Prajudi mengatakan, perkiraan kebutuhan anggaran tersebut berasal dari anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga, APBN serta Kementerian PUPR.

"Kebutuhan anggarannya tidak sampai Rp5 triliun. Kita masih hitung atau berada pada kisaran Rp2 triliun. Anggaran berasal dari Kemenpora Rp500 miliar, sisanya dari APBN-P yang masih bisa dikejar tahun ini serta anggaran Cipta Karya," ucapnya pada jumpa pers mengenai persiapan dukungan Asian Games di Jakarta kemarin.

Renovasi tersebut terdiri atas 14 *venue*, di antaranya Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Tennis Indoor dan Outdoor, Gedung Stadion Madya, Gedung Basket, Lapangan Hoki, Lapangan Panahan, Lapangan Sepak Bola A/B/C, Stadion Renang, Istora Senayan, Lapangan Softball Pintu Satu, Lapangan Latihan Bulu Tangkis (Hall ABC), Gedung Bola Voli, Lapangan Softball Cemara III, serta Lapangan Bulu Tangkis.

Terbatasnya waktu membuat Direktorat Cipta Karya hanya akan melakukan penambahan maupun renovasi yang bersifat moderat. "Kalau mengubah seluruh *venue* yang ada dengan memanfaatkan desain dan teknologi baru saya kira tidak cukup waktu. Sebab, fasilitas dukungan persiapan Asian Games ini harus selesai pada 2017," imbuh dia.

Renovasi yang cukup besar, menurut dia, diperuntukkan pada *venue* kolam renang yang akan dirombak menjadi *aquatic center* dan dibuat *indoor*. "Kolam renang salah satunya akan dirombak total sesuai standar Olympic Games (Olimpiade). Yang sekarang masih terdiri atas delapan *lines*, nanti akan kita buat menjadi 10 *lines*, begitupun kedalamannya," pungkasnya.

Kementerian PUPR juga diminta melakukan berbagai perbaikan sarana dan prasarana ruang luar bangunan kompleks olahraga seperti gerbang, loket, pedestrian, tempat parkir, pagar, toilet, penanda kawasan, *food court*, *playground*, *outdoor gym* serta tempat sampah.

Selain kawasan SUGBK, Kementerian PUPR juga ditugaskan untuk membangun kampung atlet di Kemayoran dan Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan. Untuk pembangunan kampung di dua lokasi itu Kementerian PUPR akan bekerja sama dengan BUMN Perumnas.

Direktur Utama Perumnas Hilmawan Arief Sugoto mengatakan, pihaknya akan menunggu koordinasi bersama Kementerian PUPR mengenai pembagian kerja. "Yang jelas nantinya, setelah digunakan untuk atlet, bisa juga dimanfaatkan untuk masyarakat," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Nilai investasi proyek di Jakabaring mencapai Rp400 miliar. Adapun anggaran di kampung atlet Kemayoran bisa dipastikan pada Maret 2016. "Belum tahu kalau yang di Kemayoran, kita tunggu hasil kajian Kementerian PUPR," imbuhnya.

ichsan amin

Judul	**Skema KPS Butuh Penyempurnaan**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Koran – SINDO (Halaman 17)		
Resume	Peran swasta amat dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan negeri ini, mengingat kebutuhan dananya dalam lima tahun ke depan mencapai lebih dari Rp. 5000 triliun. Namun hingga kini skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS) yang ditawarkan pemerintah terbukti masih sulit menarik investor swasta.		

Skema KPS Butuh Penyempurnaan

Tingkat Keberhasilan Proyek di Bawah 2%

JAKARTA – Pemerintah mengakui, tingkat keberhasilan proyek dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS), khususnya untuk proyek infrastruktur, tergolong sangat rendah.

BELUM MENARIK

Peran swasta amat dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan negeri ini, mengingat kebutuhan dananya dalam lima tahun ke depan mencapai lebih dari Rp5.000 triliun. Namun, hingga kini skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS) yang ditawarkan pemerintah terbukti masih sulit menarik investor swasta.

Perkiraan Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur 2015-2019

Sektor	APBN1	APBD	BUMN2	Swasta3	Total
Jalan	340.0	200.0	65.0	200.0	805.0
Kereta Api	150.0	-	11.0	122.0	283.0
Perhubungan Laut4	498.0	-	238.2	163.8	900.0
Udara	85.0	5.0	50.0	25.0	165.0
Darat (termasuk ASDP)	50.0	-	10.0	-	60.0
Transportasi Perkotaan	90.0	15.0	5.0	5.0	115.0
Ketenagalistrikan 5	100.0	-	445.0	435.0	980.0
Energi (Migas)	3.6	-	151.5	351.5	506.6
Teknologi Komunikasi dan Informatika	12.5	15.3	27.0	223.0	277.8
Sumber Daya Air	275.5	68.0	7.0	50.0	400.5
Air Minum dan Limbah	227.0	198.0	44.0	30.0	499.0
Perumahan	384.0	44.0	12.5	87.0	527.5
TOTAL INFRASTRUKTUR	**2,215.6**	**545.3**	**1,066.2**	**1,692.3**	**5,519.4**

Sumber: Kementerian PPN

Skema KPS perlu disempurnakan, mengingat keikutsertaan investor swasta sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi setidaknya Rp5.000 triliun yang tak mungkin didanai seluruhnya oleh pemerintah.

Berdasarkan data dari komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP), tingkat keberhasilan proyek KPS yang diukur dari proyek yang dimulai konstruksi di bawah 2%. Dari 91 proyek senilai USD22,5 miliar yang ditawarkan pemerintah dalam Infrastructure Summit 2005, tercatat baru dua proyek yang selesai, yaitu proyek air minum Tangerang dan jalan tol Cikampek-Palimanan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah masih mencari model skema KPS yang ideal. Menurut dia, proyek yang menggunakan skema KPS memang lebih rumit dibandingkan proyek yang sepenuhnya didanai dengan kas negara atau skema penugasan kepada badan usaha milik negara (BUMN).

"Ada suatu proses perundingan yang berkepanjangan yang kemudian membuat terlalu lambat keputusan itu diambil. Kita masih dalam proses menyempurnakannya secara terus-menerus," kata Darmin saat menjadi pembicara kunci dalam seminar "Outlook Infrastruktur 2016/2017" di Jakarta, kemarin.

Darmin menyatakan, sama seperti proyek infrastruktur pada umumnya, persoalan proyek dengan skema KPS bermula dari buruknya kualitas perencanaan yang mencakup studi kelayakan, gambar kerja detail, dan izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Buruknya perencanaan tersebut menciptakan ketidaksesuaian antara rencana dengan kebutuhan riil di lapangan.

"Belum lagi masalah perizinan apakah itu pertanahan atau kawasan hutan. Penyelesaian itu bukan hanya terlihat dalam paket-paket kebijakan, kementerian dan lembaga betul-betul terus mengubah prosedur, proses, dan pengambilan keputusan," kata dia.

Selain itu, Darmin menyebut, proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPS juga akan mendapat prioritas untuk menikmati berbagai bantuan pendanaan dari pemerintah. Pendanaan tersebut dinilai penting sebagai pemanis agar investor swasta tertarik untuk terlibat dalam proyek infrastruktur yang membutuhkan modal investasi besar dengan tingkat pengembalian modal yang sangat lama.

> *"Ada suatu proses perundingan yang berkepanjangan yang kemudian membuat terlalu lambat keputusan itu diambil."*
>
> **DARMIN NASUTION**
> Menko Perekonomian

Alasan inilah, kata Darmin, yang mendorong pemerintah menetapkan 225 daftar proyek strategis nasional yang didominasi proyek KPS dalam Peraturan Presiden No 3 tahun 2016. Proyek yang masuk dalam daftar itu akan dikawal, sekaligus diberikan jaminan politik dan finansial oleh pemerintah untuk memastikan proyek tersebut terus berjalan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menambahkan, pihaknya siap memberikan jaminan kepada investor swasta yang tertarik menggarap proyek KPS. Jaminan finansial pun siap diberikan dalam bentuk *viability gap fund* (VGF), *project development fund*, dan *government guarantee*.

"Kita kasih VGF gratis supaya proyek *feasible*. Kita sudah kasih ke proyek air minum Umbulan, Jawa Timur, 49% dari nilai proyek. Juga ada proyek air minum Lampung. Dua contoh infrastruktur publik ini menunjukkan kita *committed* langsung memberikan uang," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, kunci untuk menghindari mangkraknya pembangunan proyek infrastruktur adalah perencanaan. Sofyan mengatakan, pemerintah sudah memperoleh pinjaman lunak senilai USD150 miliar dari lembaga keuangan multilateral untuk memperbaiki kualitas perencanaan.

"Kenapa selama ini enggak bagus? Karena enggak ada dana. Dengan adanya dana, kita bisa *hire* konsultan internasional maksimal satu proyek USD30 miliar," ucapnya.

Sofyan mengatakan, rendahnya tingkat keberhasilan proyek KPS disebabkan inkonsistensi pemerintah dalam menetapkan proyek yang akan melibatkan swasta. Dia mengatakan, sering kali proyek yang sudah ditetapkan menggunakan skema KPS diubah menjadi didanai APBN atau penugasan BUMN oleh menteri terkait.

Senada, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Luky Eko Wuryanto juga mengakui bahwa pemerintah kerap tidak konsisten dalam menetapkan proyek yang akan menggunakan skema KPS. Hal tersebut membuat investor ragu untuk terlibat. Luky juga mengungkapkan, kapasitas birokrat pemerintahan juga minim pengalaman mengurusi proyek KPS.

● rahmat fiansyah

Judul	**30 Proyek Infrastruktur Rp. 851 Triliun Jadi Prioritas**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Investor Daily (Halaman 1 dan 11)		
Resume	Pemerintah melalui komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menetapkan 30 proyek infrastruktur senilai Rp. 851 triliun sebagai proyek prioritas periode 2016-2019. 30 proyek tersebut mendapat jaminan politik, perizinan, dan finansial yang tertuang dalam Perpres No. 3/ 2016. Kemudahan dan jaminan itu dituangkan dalam Inpres No. 1/2016. Kemudahan itu antara lain tentang proses perizinan dan pembebeasan tanah. Sedangkan jaminan politik misalnya konsistensi kebijakan pemerintah dan jaminan kemudahan perizinan dan jaminan finansial dari APBN. 30 proyek terpilih tersebut dipilih karena dapat menimbulkan efek *pengganda (multifier effect)* bagi masyarakat di bidang ekonomi.		

30 Proyek Infrastruktur Rp 851 Triliun Jadi Prioritas

Oleh **Yosi Winosa**

JAKARTA – Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menetapkan 30 proyek infrastruktur senilai Rp 851 triliun sebagai proyek prioritas periode 2016-2019. Ke-30 proyek tersebut mendapat fasilitas jaminan politik, perizinan, dan finansial yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Menurut Deputi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Luky Eko Wuryanto, ke-30 proyek tersebut merupakan hasil seleksi dari 225 proyek strategis dan satu program strategis.

"Sebagian proyek sudah ada progresnya, misalnya tol Manado-Bitung yang akan memasuki keputusan pemenang lelang," tutur Luky dalam paparan pers *Infrastructure Outlook 2016* di Jakarta, Rabu (10/2).

▶ Bersambung ke hal 11

30 Proyek Infrastruktur Prioritas Periode 2016-2019

No	Proyek Infrastruktur
1	Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
2	Jalan Tol Manado-Bitung
3	Jalan Tol Serang-Panimbang
4	Jalan Tol Trans Sumatera
5	Kereta Api Ekspres Bandara Internasional Soekarno Hatta (SHIA)
6	Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Jalur Selatan-Utara
7	Kereta Api Makassar-Parepare
8	Pelabuhan Utama (Hub Internasional) Kuala Tanjung
9	Pelabuhan Utama (Hub Internasional) Bitung
10	PLTA Karangkates IV & V (2x50MW)
11	PLTA Kesamben (37MW)
12	PLTA Lodoyo (10MW)
13	Inland Waterways Cikarang-Bekasi-Laut (CBL)
14	Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan
15	Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi
16	National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A
17	Sistem Pengolahan Limbah Kota Jakarta
18	SPAM Semarang Barat
19	High Voltage Direct Current (HVDC)
20	Transmisi Sumatera 500 kV
21	Central-West Java Transmission Line 500 kV
22	Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang
23	PLTU Indramayu
24	PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, 10.
25	Kilang Minyak Bontang
26	Refinery Development Master Plan (RDMP)/Revitalisasi Kilang Eksisting
27	Pelabuhan di Jawa Barat Bagian Utara
28	Kilang Minyak Tuban
29	Palapa Ring Broadband
30	Kereta Api Kalimantan Timur

Sumber : Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

30 Proyek Infrastruktur Rp 851 Triliun Jadi Prioritas

▶ Sambungan dari hal 1

Ke-30 proyek prioritas itu adalah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Tol Manado-Bitung, Jalan Tol Serang-Panimbang, KA Ekspres Bandara Internasional Soekarno-Hatta (SHIA), *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta Jalur Selatan-Utara, KA Makassar-Parepare, Pelabuhan Utama (*Hub* Internasional) Kuala Tanjung, dan Pelabuhan Utama Bitung.

Itu belum termasuk Jalan Tol Trans Sumatera 8 ruas yang meliputi Ruas Medan- Binjai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, Palembang-Tanjung Api-Api, dan Kisaran-Tebing Tinggi.

Selanjutnya proyek PLTA Karangkates IV & V (2x50 MW), PLTA Kesamben (37 MW), PLTA Lodoyo (10 MW), Inland Waterways/Cikarang-Bekasi-Laut (CBL), *Light Rail Transit* (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan, LRT Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) Fase A, Sistem Pengolahan Limbah Kota Jakarta, dan SPAM Semarang Barat.

Kemudian proyek *High Voltage Direct Current* (HVDC), Transmisi Sumatera 500 kV, *Central-West Java Transmission Line* 500 kV, *Central Java Power Plant* (CJPP)/PLTU Batang, PLTU Indramayu, PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, dan 10, serta Kilang Minyak Bontang.

Proyek lainnya yaitu *Refinery Development Master Plan* (RDMP)/Revitalisasi Kilang Eksisting (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju), Pelabuhan di Jawa Barat bagian utara, Kilang Minyak Tuban, *Palapa Ring Broadband*, dan proyek KA Kalimantan Timur.

Kemudahan dan Jaminan

Luky menjelaskan, dengan ditetapkannya proyek infrastruktur sebagai proyek prioritas, para pejabat dan badan usaha pelaksana akan mendapat kemudahan dan jaminan. Selain diatur dalam Perpres No 3 Tahun 2016, kemudahan dan jaminan itu ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perpres dan inpres tersebut diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Januari lalu.

Kemudahan itu, kata Luky, di antaranya mencakup percepatan proses perizinan dan pembebasan tanah bagi pejabat atau badan usaha pelaksana. Sedangkan jaminan meliputi opsi jaminan politik, seperti konsistensi kebijakan pemerintah dan jaminan kemudahan perizinan atau jaminan finansial dari APBN yang diberikan secara selektif oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Semua diatur secara rinci," ujar dia.

Luky Eko mengungkapkan, penetapan 30 proyek prioritas tersebut bakal menjadi terobosan bagi percepatan realisasi proyek. Selama ini, proyek infrastruktur kerap terkendala perizinan dan pembebasan lahan, yang akhirnya menimbulkan keraguan di kalangan investor. "Targetnya hingga 2019 adalah memastikan kemudahan dalam merealisasikan proyek-proyek ini," tandas dia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menambahkan, ke-30 proyek prioritas tersebut dipilih karena dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) ekonomi kepada masyarakat.

Dalam 30 proyek prioritas itu, menurut dia, terdapat beberapa skema pembangunan, seperti proyek murni pemerintah, proyek kerja sama dengan badan usaha (PKBU), proyek kerja sama pemerintah swasta (KPS), dan penugasan BUMN.

Sofyan menjelaskan, PKBU dan KPS akan membantu penyediaan infrastruktur secara keseluruhan di Indonesia. Soalnya, di samping 30 proyek prioritas, masih terdapat proyek murni APBN yang akan dipercepat pemerintah, misalnya pembangunan 48 bendungan. "Kebutuhan dana infrastruktur sangat besar, terutama untuk luar Jawa. Jika swasta berminat, tentu kami dukung," tegas dia.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan, KPPIP akan menetapkan skema pembiayaan ke-30 proyek tersebut. Kemenkeu juga bakal mengkaji kemungkinan memperbesar alokasi dana dukungan tunai (*viability gap funding*/VGF) untuk proyek prioritas infrastruktur. Pada APBN 2016, VGF baru diberikan kepada dua proyek senilai Rp 1,1 triliun.

"Kami akan fasilitasi 30 proyek ini, apakah perlu VGF, jaminan politik, atau finansial. Kami juga akan mendukung sisi ekonominya agar investor tertarik," ujar dia.

Banyak Hambatan

Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, pemerintah terus berkomitmen mendorong proyek infrastruktur yang implementasinya masih terhambat karena berbagai faktor. "Tekad pemerintah bulat dan komitmen kami jelas. Namun, kami melihat masih banyak yang menghambat," kata dia.

Darmin mengemukakan, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, Indonesia masih tertinggal dalam penyediaan infrastruktur. "Pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan," tandas dia.

Dia menambahkan, pembenahan itu dilakukan untuk mengatasi sejumlah persoalan yang menghambat implementasi, seperti regulasi yang tumpang tindih, penyiapan proyek KPS yang rumit, serta lamanya proses perundingan dengan investor.

"Intinya kami memerlukan *champion* untuk mengawal pembangunan pelaksanaan infrastruktur. Itulah yang melatarbelakangi perlunya KPPIP," tegas dia.

Darmin memastikan KPPIP bakal mengawal pengerjaan 30 proyek infrastruktur prioritas pemerintah, seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.

Menurut dia, proyek yang ditetapkan menjadi prioritas KPPIP akan mendapatkan beberapa fasilitas dan keistimewaan untuk mempercepat pelaksanaan. "Dengan demikian, pemerintah dan swasta diharapkan semakin berkomitmen untuk terlibat dalam penyediaan infrastruktur," ucap dia.

Darmin mengakui, skema KPS dalam proyek infrastruktur sebagai salah satu alternatif pembiayaan kebutuhan proyek infrastuktur senilai Rp 5.500 triliun pada periode 2015-2019 perlu penyempurnaan-penyempurnaan.

"Kami menilai tingkat keberhasilan KPS selama ini masih rendah. Pemerintah masih mencari model skema KPS yang ideal. Skema KPS lebih rumit dibandingkan proyek yang sepenuhnya didanai dengan kas negara atau skema penugasan kepada BUMN," tutur dia.

Di Bawah 2%

Darmin Nasution mengungkapkan, berdasarkan data KPPIP, tingkat keberhasilan proyek KPS yang diukur dari proyek yang dimulai konstruksi hanya di bawah 2%. Pemerintah menawarkan 91 proyek senilai US$ 22,5 miliar dalam *Infrastructur Summit 2005*, namun baru dua proyek yang selesai, yaitu proyek air minum Tangerang dan jalan tol Cikampek-Palimanan.

"Seperti proyek infrastruktur pada umumnya, persoalan proyek dengan skema KPS bermula pada buruknya kualitas perencanaan yang mencakup studi kelayakan, gambar kerja detail, dan izin amdal," kata dia.

Sofyan Djalil menjelaskan, kunci untuk menghindari mangkraknya pembangunan proyek infrastruktur adalah perencanaan. Pemerintah sudah memperoleh pinjaman lunak senilai US$ 150 miliar dari lembaga keuangan multilateral untuk memperbaiki kualitas perencanaan. "Selama ini perencanaan nggak bagus karena nggak ada dana," tegas dia.

Sofyan menambahkan, seringkali proyek yang sudah ditetapkan menggunakan skema KPS diubah ke skema pendanaan APBN atau penugasan BUMN oleh menteri terkait. **(az)**

Judul	**30 Proyek Infrastruktur dikawal Ketat**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Media Indonesia (Halaman 17)		
Resume	Pemerintah mengakui oenggarapan proyek-proyek infrastruktur belum optimal, oleh karena itu 30 proyek infrastruktur dari 225 proyek strategis nasional dimasukkan ke pengawasan Komiter Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) 2015-2019. Saat ini banyak factor yang memperlambat implementasi proyek di lapangan, oleh karena itu dengan adanya KPPIP, aral yang melintang dalam proses pengadaan proyek diharapkan dapat diatasi.		

Proyek Prioritas Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) (2015-2019)

30 proyek prioritas:

Jalan Tol
- Tol Balikpapan-Samarinda
- Tol Manado-Bitung
- Tol Panimbang Serang
- Delapan ruas tol trans-Sumatra

Kereta
- Kereta api ekspres SHIA
- MRT Jakarta jalur selatan-utara
- Kereta api Makassar-Parepare
- Light rail transit (LRT) di Sumatra Selatan
- Light rail transit (LRT) terintegrasi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
- Kereta api Kalimantan Timur

Kilang Minyak
- Kilang minyak Bontang
- RDMP/revitalisasi kilang eksisting (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju)
- Kilang minyak Tuban

Pembangkit Listrik dan Transmisi
- PLTA Karangkates IV dan V (2x50 Mw)
- PLTA Kesamben (37 Mw)
- PLTA Lodoyo (10 Mw)
- PLTU Batang
- PLTU Indramayu
- PLTU Mulut Tambang Sumatra Selatan 8, 9, 10
- Transmisi Sumatra 500 kv
- Central-West Java transmission line 500 kv
- High voltage direct current (HVDC)

Pelabuhan
- Pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung
- Pelabuhan hub internasional Bitung NCICD
- Pelabuhan di Jawa Barat bagian utara

Sanitasi
- Sistem pengolahan limbah Jakarta
- Sistem penyediaan air minum di Semarang Barat

Pesisir
- National capital integrated coastal development (NCICD) fase A
- Inland waterways Cikarang-Bekasi-Laut (CBL)

Komunikasi
- Palapa ring broadband

Sumber: KPPIP/Grafis: [illegible]

30 Proyek Infrastruktur Dikawal Ketat

Para menteri diingatkan agar berhenti memakai jargon basi.

ANASTASIA ARVIRIANTY

PEMERINTAH mengakui pengerjaan proyek infrastruktur belum optimal. Maka itu, 30 proyek infrastruktur dari 225 proyek strategis nasional dimasukkan ke pengawasan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang juga menjabat Ketua KPPIP mengatakan pihaknya bertugas mempercepat realisasi proyek-proyek prioritas itu. Sebagian dari 30 proyek dimaksud sudah mulai digarap sejak 2015. Namun, banyak juga yang belum dimulai.

Menurutnya, sampai kini, pemerintah menilai penyiapan proyek infrastruktur masih amat lemah. Banyak faktor yang memperlambat implementasi. Mulai dari ketiadaan koordinasi antarinstansi, ketidaksesuaian pendanaan dengan kebutuhan investasi, sampai persiapan tidak matang.

"Intinya kita butuh sesuatu untuk mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut, itulah yang melatarbelakangi perlunya KPPIP ini," tuturnya dalam acara Infrastructure Outlook 2016, di Jakarta, kemarin.

Dengan adanya KPPIP, aral yang melintang dalam proses pengadaan proyek diharapkan bisa segera diatasi. Adapun proyek yang ditetapkan menjadi prioritas KPPIP akan mendapat beberapa fasilitas dan keistimewaan untuk mempercepat pelaksanaan.

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Luky Eko Wuryanto mengatakan akan mengawal percepatan pembangunan 30 proyek prioritas mulai dari persiapan hingga operasional guna mendukung implementasi proyek. "Tentunya ada napas percepatannya juga. Kalau ada masalah, kita lakukan *debottlenecking*," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah itu.

Dengan begitu, investor, terutama swasta, diharapkan makin berkomitmen dalam penyediaan infrastruktur. Selain itu, untuk lebih memikat minat pemodal asing masuk ke sektor riil, pemerintah hari ini berencana mengumumkan Paket Kebijakan X. Isi paket ke-10 itu antara lain mengubah batasan penanaman modal bagi asing di berbagai sektor potensial lewat revisi daftar negatif investasi (DNI). Namun, dalam Sidang Paripurna di Istana Negara, kemarin, Presiden Joko Widodo meminta revisi DNI tetap dapat memperkuat daya saing perusahaan nasional.

Pengendali anggaran

Dalam sidang serupa, dibahas pula penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. Kepada para pembantunya, Jokowi meminta perubahan total pada RKP mendatang, khususnya dalam hal penguasaan anggaran.

"Saya ingin perubahan total. Artinya menteri betul-betul kendalikan anggaran dan tidak diberikan kepada bawahan baik dirjen, direktur," ujarnya.

Tuntutan itu disampaikan Presiden lantaran ia tidak ingin ada lagi penggunaan anggaran berdasar prinsip *money follow function*. Misalnya, ia mencontohkan, di Kementerian PU-Pera ada alokasi Rp100 triliun. Jumlah itu langsung dibagi-bagi ke direktorat dan seksi. "Kalau memang belum ada (kegiatan) prioritas, jangan diberi. Tidak perlu setiap ditjen ada anggaran."

Para menteri pun diingatkan agar program RKP 2017 tidak lagi memakai jargon basi. "Lupakan kata 'pemberdayaan', 'penguatan', 'pengembangan', dan 'pembangunan'. Langsung saja, misalnya 'beli jaring, benih', dan 'kapal untuk nelayan'. Supaya anggaran tidak lari ke mana-mana." (Nov/Ant/E-2)

arvirianty@mediaindonesia.com

Judul	**Renovasi GBK butuh 2 Triliun**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Investor Daily		
Resume	Renovasi kompleks Gelora Bung Karno dalam rangka Asian Games (18 Agustus-2 September 2018) diperkirakan mencapai 2 triliun. Renovasi akan dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya. Namun, pemerintah masih melakukan kanjian mendlam untuk merenovasi kompleks bersejarah tersebut. Kementerian PUPR juga akan menggandeng Ikatan Arsitekk Indonesia (IAI) dalam proses perancangannya.		

Renovasi GBK Butuh Anggaran Rp 2 Triliun

JAKARTA – Renovasi kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, membutuhkan anggaran Rp 2 triliun. Renovasi dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengingat Kompleks itu akan dipergunakan sebagai tuan rumah Asian Games ke-18, pada 18 Agustus 2018 hingga 2 September 2018.

"Perkiraan biaya renovasi bisa mencapai Rp 2 triliun," kata Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Adjar Prajudi, di Jakarta, Rabu (10/2).

Namun, kata dia, pemerintah masih melakukan kajian lebih mendalam untuk merenovasi kompleks bersejarah tersebut.

Menurut dia, anggaran renovasi bakal dipenuhi dari APBN tahun 2016 yang masuk di DIPA Kementerian PUPR. Namun, ujarnya, ada sumber pendanaan lain yang dialihkan dari alokasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebesar Rp 500 miliar. "Ditambah lagi dengan APBN-Perubahan," kata dia.

Adjar mengatakan, untuk merenovasi Kompleks tersebut, pihaknya membutuhkan payung hukum sebagai dasar dari pengerjaan proyek. Karena itu, kata dia, rencananya dalam waktu dekat akan keluar Instruksi Presiden (Inpres).

"Renovasi dan penataan kawasan komplek GBK dimaksudkan untuk menciptakan kualitas ruang luar bangunan *venues* yang lebih baik, namun dapat menyatu dengan bangunannya," katanya.

14 Fasilitas

Menurut Adjar, renovasi dan penataan kawasan komplek GBK dimaksudkan untuk menciptakan kualitas ruang luar bangunan *venues* yang lebih baik, namun dapat menyatu dengan bangunannya. Dalam menata kawasan komplek GBK, Kementerian PUPR akan bekerjasama dengan tim dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

"Kerjasama itu baik dalam tahapan perencanaan, pengawasan berkala, perbaikan pasca *test event* sampai berakhirnya Asian Games," ujarnya.

Beberapa usulan perbaikan sarana dan prasarana ruang luar bangunan seperti gerbang, loket, pedestrian, dan parkir. Selain itu, pagar, tempat duduk, toilet, penanda kawasan, *food court*, *playground*, *outdoor gym*, dan tempat sampah. "Renovasi itu ada 14 *venues*, termasuk Stadion Utama Gelora Bung Karno," kata Adjar.

Venues lain yang juga bakal direnovasi adalah Tenis Indoor dan Outdoor, Gedung Stadion Madya, Gedung Basket, Lapangan Hoki, Lapangan Panahan, dan Lapangan Sepakbola A/B/C, Stadion Renang. Lalu, Istora Senayan, Lapangan Softball Pintu Satu, Lapangan Latihan Bulu Tangkis (Hall ABC), Gedung Bola Voli, Lapangan Softball Cemara III, dan Lapangan Bulu Tangkis.

Menurut dia, pada awalnya rencana renovasi tersebut akan dilakukan secara besar-besaran dengan mengubah seluruh *venues* menggunakan teknologi yang ada sekarang. Namun Presiden Joko Widodo meminta Kementerian PUPR untuk melakukan renovasi moderat dan hanya 14 *venues* yang ada.

"Awalnya, kami akan membuat kualitas lingkungan kompleks GBK lebih baik dengan desain teknologi tahun 2016-2018. Karena waktu yang diberikan terbatas dan harus selesai pada Juli 2017, kami pilih yang moderat dengan membuat kompleks bangunan seperti pada awal dibangun tahun 1962," jelasnya. **(imm)**

Judul	**Pemerintah Tetapkan Tujuh Isu Strategis dalam Peta Jalan**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Kompas (Halaman 18)		
Resume	Pemerintah menetapkan tujuh isu strategis pada peta jalan perdanganan secara elektronik (e-dagang), yaitu logistic, pendanaan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, pajak, pendidikan, dan kemanan siber. Dalam isu pendanaan , disepakati pembentukan badan layanan umum yang dapat menyalurkan hibah atau subsidi pemerintah, optimalisasi skema kredit usaha rakyat (KUR), dan penyertaan modal ventura.		

E-DAGANG

Pemerintah Tetapkan Tujuh Isu Strategis dalam Peta Jalan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menetapkan tujuh isu strategis pada peta jalan perdagangan secara elektronik atau e-dagang, yakni logistik, pendanaan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, pajak, pendidikan, dan keamanan siber. Isu strategis ini diturunkan menjadi 30 inisiatif kebijakan yang akan disusun kementerian dan lembaga berdasarkan prioritas kebutuhan industri.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengemukakan hal itu setelah rapat koordinasi peta jalan e-dagang, Rabu (10/2), di Jakarta. Rapat dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

Rudiantara mengatakan, pendanaan menjadi perhatian utama pemerintah. Terkait itu antara lain disepakati pembentukan badan layanan umum yang dapat menyalurkan hibah atau subsidi pemerintah, optimalisasi skema kredit usaha rakyat (KUR), dan penyertaan modal ventura.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan empat peraturan terkait penyertaan modal melalui perusahaan ventura. Dengan itu, pengusaha modal ventura didorong turut membiayai sektor industri kreatif, termasuk bidang usaha digital. "Pemerintah akan terus mengevaluasi apakah empat peraturan itu mampu memberi nilai terhadap pembiayaan usaha e-dagang di Indonesia," kata Rudiantara.

Masih berkait pendanaan, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menyatakan, pemerintah sepakat mengatur urun dana publik (*crowdfunding*) yang selama ini sering digunakan membiayai e-dagang berskala usaha rintisan. Ada tiga bentuk urun dana, yaitu penyertaan modal/saham, utang, dan hibah. Bentuk yang dibebaskan negara adalah hibah.

"Dalam waktu dekat, pemerintah akan menetapkan Revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pendanaan e-dagang juga dapat dilakukan melalui hasil revisi itu," lanjut Rudiantara.

Isu perlindungan konsumen juga jadi sorotan. Kepercayaan konsumen dapat dibangun melalui regulasi, perlindungan pelaku industri, penyederhanaan pendaftaran perizinan bisnis e-dagang, dan pengembangan *national payment gateway* (NPG). NPG adalah sinergi sistem pembayaran dengan ATM, *mobile banking*, dan *internet banking*.

Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Daniel Tumiwa menyambut baik garapan isu peta jalan e-dagang yang dinilai sesuai dengan harapan asosiasi. Namun, beberapa hal perlu diperbaiki, antara lain terkait ketenagakerjaan dan insentif kemudahan investasi. (MED)

Judul	**Kereta Cepat Bukan Prioritas**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Republika (Halaman 15)		
Resume	Kepala BAPPENAS menyatakan bahwa proyek kereta api Jakarta-Bandung tidak masuk dalam 30 proyek prioritas yang diusung pemerintah. Bahkan proyek ini hanya menjadi satu dari 225 proyek strategis nasional. Namun demikian pengerjaannya tetap diutamakan, mengintag groundbreaking yang telah menelan biaya besar telah dihelat Januari silam. Sampai saat ini belum ada permasalahan yang bisa menghambat pengerjaan proyek ini, namun ada beberapa hal dari regulator yang mesti diselesaikan.		

Kereta Cepat Bukan Prioritas

● DEBBIE SUTRISNO, MUHAMMAD NURSYAMSYI

Kemenperin sedang menyusun peta jalan industri penunjang perkeretaapian.

JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung tidak masuk ke dalam 30 proyek prioritas yang diusung pemerintah. Bahkan, proyek ini hanya menjadi satu dari 225 proyek strategis nasional.

"Ini (kereta cepat) dalam proyek yang 225 (proyek strategis)," ujar Sofyan, di Jakarta, Rabu (10/2).

Meskipun hanya dikategorikan proyek strategis, Sofyan menyebut pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tetap diutamakan. Apalagi, seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek yang ditaksir menelan biaya sekitar 5,5 miliar dolar AS atau setara Rp 76,4 triliun (kurs Rp 13.900 per dolar AS) ini telah dihelat pada Januari silam.

Selain itu, Sofyan menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga akan dibantu secara maksimal oleh pemerintah. Bantuan itu memiliki bentuk yang beragam, dimulai dari regulasi, finansial, hingga perizinan pertanahan. "Semua akan dipermudah pemerintah," kata Sofyan.

Lebih lanjut, mantan menko perekonomian ini menambahkan, sejauh ini belum ada permasalahan yang bisa menghambat pengerjaan kereta cepat. Hanya saja, ada beberapa hal dari regulator yang mesti diselesaikan. Pemerintah pun akan memberikan jaminan politik dalam pembangunan ini.

"Jaminan politik ini bukan jaminan uang, melainkan jaminan pemerintah yang tidak akan merugikan investor," ujarnya.

Pakar transportasi publik, Djoko Setijowarno, mengatakan, terdapat sejumlah aspek yang perlu dicermati pemerintah agar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak tersandung. Salah satunya dari sisi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Djoko mengatakan, studi amdal harus lebih mendalam dengan melibatkan ahli di bidang kebencanaan. Sebab, wilayah yang dilintasi termasuk rawan bencana alam, seperti tanah longsor.

Menurut Djoko, kelengkapan mitigasi bencana sangat penting. Sebagai contoh, Jepang yang lebih rawan bencana, terutama gempa bumi, namun dapat membangun kereta cepat dengan mumpuni.

"Transportasi wajib memperhatikan keselamatan penumpang. Rancang bangun atau DED jalur harus sesuai standar keselamatan pembangunan jalur dan operasi kereta cepat," kata Djoko.

Industri penunjang

Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, saat ini Kemenperin sedang menyusun peta jalan industri penunjang perkeretaapian yang mengacu pada pohon industri kereta api. Latar belakangan penyusunan ini adalah kereta api telah ditetapkan menjadi industri prioritas dalam Perpres No 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.

"Kami akan menyusun produk komponen apa saja yang akan dikuasai dalam jangka waktu tertentu, baik yang sifatnya tahunan, lima tahunan, maupun 25 tahun ke depan," ujar Suryawirawan.

Suryawirawan menjelaskan, industri penunjang perkeretaapian menjadi prioritas dan strategis untuk dikembangkan. Sehingga, keterlibatan industri lokal dapat maksimal.

Apalagi, bisnis perkeretaapian di Indonesia masih relatif baru berkembang dan belum ada ketergantungan terhadap prinsipiel. Dengan demikian, penanganannya harus secara khusus agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang maksimal.

Ketua Asosiasi Industri Perkeretaapian Indonesia Tony Budi Santoso mengatakan, industri kereta api dan komponen kereta api sebenarnya sudah tumbuh di Indonesia, namun masih terpisah-pisah dan belum memiliki wadah asosiasi. Menurutnya, melalui wadah asosiasi ini, dapat membantu mendukung program pembangunan infrastruktur konektivitas di jalan darat dan penyediaan moda transportasi massal yang efisien.

"Kami bersama pemerintah akan menjawab tantangan yang besar di industri kereta api," ujarnya.

■ rizky jaramaya **ed:** muhammad iqbal

Judul	**TOD Kereta Cepat Tunggu Rencana Induk**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Koran Tempo (Halaman 13)		
Resume	PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) sedang menyiapkan rencana induk pengembangan empat kawasan terpadu transportasi massal (*transit oriented development/TOD*) di sepanjang jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembuatan rencana induk tersebut dilakukan oleh konsultan. Setelah rencana induk rampung, barulah kawasan kawasan tersebut dapat digarap oleh KCIC.		

TOD KERETA CEPAT TUNGGU RENCANA INDUK

Konsepnya adalah pusat bisnis yang terintegrasi dengan stasiun kereta cepat.

Khairul Anam
khairul@tempo.co.id

ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A

Lokasi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, 21 Januari 2016.

JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) sedang menyiapkan rencana induk pengembangan empat kawasan terpadu transportasi massal (*transit-oriented development*/TOD) di sepanjang jalur kereta cepat Jakarta–Bandung. Ada empat lokasi yang disiapkan, yakni di Halim, Jakarta Timur; Walini, Bandung Barat; Karawang, Jawa Barat; dan Tegal Luar, Jawa Barat.

Direktur Utama KCIC Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan rencana induk tersebut digarap oleh konsultan yang ditunjuk. Setelah rencana induk rampung, barulah KCIC mulai menggarap kawasan-kawasan tersebut. "Para investor kawasan terpadu akan ditentukan melalui lelang," dia mengungkapkan.

Selain melalui lelang, menurut Hanggoro, tidak tertutup kemungkinan anggota konsorsium KCIC sendiri yang mengembangkan TOD. Salah satunya adalah PT Wijaya Karya Tbk melalui anak usahanya, PT Wijaya Karya Realty. Di luar TOD, kata dia, anggota konsorsium lainnya, yaitu PT Perkebunan Nusantara VIII, juga memiliki lahan seluas 2.900 hektare yang akan dikembangkan menjadi Kota Baru Walini.

Ihwal pengembangan Kota Baru Walini, Kepala Bagian Pengembangan Aset dan Usaha PTPN VIII Hendra Mardiana mengatakan nantinya mengacu pada rencana induk TOD kereta cepat. "Kami akan menyesuaikan konsep Kota Baru Walini dengan rencana induk TOD, supaya pengembangannya tidak bertabrakan," kata dia.

Dia menuturkan PTPN VIII telah menyiapkan lahan seluas 2.995 hektare di Kebun Panglejar, Bandung Barat, yang bisa diolah menjadi Kota Baru Walini. Lahan itu di luar 1.270 hektare lahan di Panglejar yang telah disetor sebagai modal PTPN VIII dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, konsorsium empat badan usaha milik negara penggarap kereta cepat.

Dalam dokumen rencana pengembangan KCIC, disebutkanbahwa pengembangan Kota Baru Walini dan TOD Walini dibagi dalam tiga zona. Zona pertama adalah kawasan Maswati Timur yang merupakan pusat bisnis terintegrasi dengan stasiun kereta cepat. Zona kedua adalah Panglejar yang berisikan fasilitas rekreasi dan kesehatan. Sementara itu, zona ketiga adalah Maswati Barat sebagai kawasan pendidikan.

Staf Khusus Menteri BUMN Sahala Lumban Gaol mengatakan pemerintah akan membangun TOD Walini dengan konsep kota hijau. "Ada pusat kegiatan musik di sana," ujar dia. Sahala menambahkan, proyek ini juga akan membuka peluang bagi bisnis kecil menengah. Masyarakat sekitar bisa berpartisipasi dengan potensi yang dimilikinya.

"Tinggal tergantung pada kreativitas usaha pelakunya. Misalnya pembuatan suvenir dan produk budaya."

Namun, sebelum bisa mengembangkan kota mandiri dan TOD, penggarap proyek senilai US$ 5,58 miliar ini harus menyelesaikan revisi studi kelayakannya terlebih dulu. Ditemui Selasa lalu, Hanggoro mengatakan akan menyerahkan dokumen revisi studi kelayakan dalam waktu satu bulan mendatang.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan pemerintah meminta revisi mengenai analisis jumlah penumpang. Dalam studi kelayakan, jumlah penumpang ketika kereta mulai beroperasi pada 2019 diestimasikan sebanyak 28 ribu orang per hari.

● ALI HIDAYAT | REZKI ALVIONITASARI | ANANDA TERESIA

Judul	**GBK tak Dirombak Total**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Kompas (Halaman 8)		
Resume	Mepetnya waktu persiapan Asian Games Jakarta-Palembang 2018 menjadi tantangan bagi pembangunan infrastruktur oleharaga dan sarana pendukungnya. Dalam waktu sekitar setahun, renovasi 14 arena di kawasan Gelora Bung Karno akan disesuaikan dengan waktu yang ada.		

Stadion akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, adalah salah satu arena Asian Games 2018 yang harus dirombak total.

GBK Tak Dirombak Total

Satlak Prima Diminta Memilih Cabang Ke-37 Asian Games 2018

JAKARTA, KOMPAS — Mepetnya waktu persiapan Asian Games Jakarta-Palembang 2018 menjadi tantangan bagi pembangunan infrastruktur olahraga dan sarana pendukungnya. Dalam waktu sekitar setahun, renovasi 14 arena di kawasan Gelora Bung Karno akan disesuaikan dengan waktu yang ada.

"Direncanakan, arena di GBK dan sarana pendukungnya akan kami renovasi secara moderat, bukan rombak total, mengingat waktu yang ada tidak akan cukup jika dirombak total," kata Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Adjar Prajudi, Rabu (10/2), di Jakarta.

Adjar mengatakan, ada dua skenario yang disiapkan. Pertama, model kontrak konvensional, seperti proses pembangunan proyek infrastruktur pada umumnya, yakni proses lelang desain yang lalu dilanjutkan lelang konstruksi hingga konstruksi. Dengan proses itu, pengerjaan fisik direncanakan awal Juli 2016 dan ditargetkan selesai akhir Juli 2017 atau 13 bulan.

Skenario ini berlaku untuk rehabilitasi arena yang tak terlalu besar, yakni Stadion Tenis Indoor, Tenis Outdoor Center Court, dan Stadion Madya. Begitu pula gedung basket, gedung latihan bulu tangkis, gedung bola voli, lapangan hoki, lapangan panahan, dan lapangan sepak bola A. Penataan lingkungan kompleks GBK dan Kampung Atlet Kemayoran pun sama.

Adapun skenario kedua adalah kontrak untuk desain dan membangun (*design and build*). Pada skenario ini, lelang sekaligus dilakukan untuk pembuatan desain sekaligus membangunnya. Diharapkan skenario ini bisa menghemat waktu.

Arena yang harus dikerjakan dengan skenario itu adalah Stadion Utama GBK, stadion akuatik, Istora Senayan, dan lapangan sofbol. Dengan skenario ini, masa konstruksi, termasuk perencanaan, mencapai tiga bulan, dimulai April dan selesai Juli 2017.

Renovasi besar terjadi pada stadion akuatik. Sesuai standar Olimpiade, stadion itu akan dibuat tertutup dengan 10 lintasan. Sementara saat ini baru 8 lintasan. Selain penambahan lintasan, kedalaman kolam juga ditambah. Terhadap Stadion Utama GBK yang termasuk cagar budaya, rehabilitasi dilakukan tanpa mengubah bentuk asli.

"Kami masih menunggu instruksi presiden tentang dukungan penyelenggaraan Asian Games 2018. Inpres itu akan mengatur tugas masing-masing kementerian dan lembaga," kata Adjar.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengatakan, total kebutuhan anggaran rehabilitasi arena dan kawasan GBK masih dihitung. "Dari Kemenpora, ada dana Rp 500 miliar yang bisa dipakai," kata Taufik.

Sementara itu, pemerintah dan Komite Olimpiade Indonesia akan menyerahkan penentuan cabang ke-37 Asian Games 2018, yang merupakan pilihan tuan rumah, kepada Satlak Prima. Keputusan mengenai cabang ke-37 itu sudah harus ditetapkan Jumat besok, untuk dilaporkan kepada Dewan Olimpiade Asia (OCA) bersama perbaikan masterplan.

Hal itu disampaikan juru bicara Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, Selasa (9/2), di Jakarta. "*Deadline*-nya, seperti diputuskan OCA, adalah Jumat pekan ini. Kami, pemerintah, dan KOI sudah menyepakati biar Satlak Prima yang memutuskan karena mereka yang lebih tahu di lapangan cabang mana yang bisa memberi lebih banyak medali untuk tuan rumah," ujar Gatot.

Hingga Rabu, empat cabang bersaing menjadi cabang ke-37. Keempat cabang itu ialah bridge, paralayang, jetski, dan sepatu roda. Sebelumnya, OCA menetapkan 28 cabang Olimpiade dan delapan cabang non-Olimpiade di Asian Games 2018.

"Menurut saya, ada tiga cabang yang sangat potensial, yaitu paralayang, bridge, dan jet ski, karena sudah berbicara di pentas internasional, dan kita unggul," ujar Muddai Madang, Wakil Ketua Umum KOI. (NAD/HLN/OKI)

Judul	**Pemerintah Prioritaskan 30 Proyek Infrastruktur**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Tempo (Halaman 15)		
Resume	Pemerintah menetapkan 30 proyek infrastruktur prioritas. Penentuan ini adalah hasil diskusi dari seluruh kementerian dan lembaga negara. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan menjadi pengawas jalannya 30 proyek prioritas tersebut.		

Pemerintah Prioritaskan 30 Proyek Infrastuktur

Tahun ini hanya ada delapan proyek baru.

Andi Rusli
andi.ibnu@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah menyatakan ada 30 proyek yang masuk skala prioritas tahun 2016-2017. Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Luky Eko Wuryanto, mengatakan proyek-proyek tersebut bernilai lebih dari Rp 875 triliun.

Menurut Luky, proyek prioritas ini merupakan hasil diskusi dari seluruh kementerian dan lembaga negara. KPIP akan menjadi pengawas jalannya 30 proyek tersebut dan menjalin komunikasi dengan kementerian ataupun lembaga terkait. "Awalnya ada 60 proyek, tapi setelah disepakati 30 proyek ini dulu yang diprioritaskan," katanya, kemarin.

Luky mengatakan lembaganya sudah memfasilitasi kelancaran beberapa proyek, antara lain kilang minyak Bontang, yang sudah lama menjadi polemik; dan proyek *mass rapid transit* di Jakarta. Tapi, dia mengakui, program prioritas tahun ini cuma ada delapan proyek baru ditambah limpahan 22 proyek prioritas KPPIP tahun 2015.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan landasan hukum 30 proyek prioritas adalah Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015. Dari 30 proyek tersebut, kata Darmin, beberapa di antaranya menjadi upaya untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dasar, seperti jalan tol Panimbang Serang, *light rail transit* Sumatera Selatan, serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang. Namun Darmin mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak memiliki tingkat prioritas tinggi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana US$ 150 juta untuk jasa konsultan pembangunan. Musababnya, saat ini banyak proyek yang rencana anggarannya meleset jauh dari kebutuhan pelaksanaannya. Sebelum dieksekusi, proyek prioritas harus menyiapkan studi kelayakan dan segala urusan administrasi yang diawasi oleh konsultan dan KPPIP.

Sofyan mengatakan, meskipun harus menyiapkan uang lebih dari Rp 750 triliun dan lebih dari separuh proyek berlokasi di Jawa, pemerintah menjamin pembangunan takkan melulu di Pulau Jawa. "Ada ribuan proyek infrastruktur di luar Pulau Jawa yang pasti dibangun," katanya.

Karena itu, dalam 30 proyek tersebut, Bappenas mendahulukan skema pembayaran Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) ataupun penugasan pembangunan melalui badan usaha milik negara. Direktur Jendral Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan siap membantu KPPIP dan mencarikan ruang fiskal pembiayaan proyek-proyek tersebut. Kemenkeu tinggal menunggu KPPIP mengajukan skemanya, baik melalui anggaran pendapatan belanja negara, KPS, maupun penunjukan BUMN.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, mengatakan pembangunan infrastruktur pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam dan luar negeri dalam menggerakkan roda perekonomian. Terlebih dengan pembangunan infrastruktur di daerah. "Di Manado, angka penjualan properti meningkat karena sudah banyak akses jalan di sana," katanya. ●

ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI

Sejumlah pekerja merangkai besi tiang pembangunan proyek kereta api ringan (*light rail transit*) di Jalan Barlian, Palembang, Sumatera Selatan. LRT ini merupakan salah satu proyek prioritas.

Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas

KARENA keterbatasan dana APBN, pemerintah mendahulukan skema pembiayaan kerja sama pemerintah-swasta dalam membiayai proyek infrastruktur, termasuk proyek infrastruktur prioritas. Lembaga pembiayaan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) juga telah ditawari untuk mendanai pembangunan empat proyek senilai Rp 13,5 triliun.

Nama Proyek	Nilai (Rp triliun)	Rencana Skema
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda	11,4	APBN, BUMN
Jalan Tol Serang-Panimbang	12	Potensi KPS
Jalan Tol Trans-Sumatera (8 ruas)	31	BUMN
Kereta Api Ekspres Bandara Internasional Soekarno-Hatta (SHIA)	24	Potensi BUMN
Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Jalur Selatan-Utara	25	APBN, KPS
Pelabuhan Utama (Hub Internasional) Kuala Tanjung	30	Potensi KPS
Pelabuhan Utama (Hub Internasional) Bitung	34	Potensi KPS
Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	13,2	BUMN
National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A	26	APBN, APBD, KPS
High Voltage Direct Current (HVDC)	33,4	APBN, KPS
Transmisi Sumatera 500 kilovolt	24,4	BUMN, Swasta
Central – West Java Transmission Line 500 kilovolt	7,64	Potensi APBN, KPS
Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang	40	IPP KPS
PLTU Indramayu	20	APBN, KPS
PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, 10	72	IPP
Kilang Minyak Bontang	75-140	KPS
Refinery Development Master Plan (RDMP)/Revitalisasi Kilang	210	Potensi BUMN
Kilang Minyak Tuban	72	BUMN
Palapa Ring Broadband	3,6	KPS
Kereta Api Kalimantan Timur	25	Swasta

SUMBER: KPPIP | ANDI RUSLI

Judul	**Paripurna RPJMN dan Investasi**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Kompas (Halaman 17)		
Resume	Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnadi, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan berbincang sebelum siding paripurna di Istana Negara. Sidang cabinet tersebut membahs penyusunan rencana kerja pemerintah, percepatan integrase RPJMN dan Daftar Negatif Investasi.		

Paripurna RPJMN dan Investasi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan (dari kiri ke kanan) berbincang sebelum sidang paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2). Sidang kabinet itu membahas penyusunan rencana kerja pemerintah, percepatan integrasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan daftar negatif investasi.

Judul	**Ruang Hijau Kurang, Picu Masalah Kota**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Kompas (Halaman 26)		
Resume	Luas Ruang terbuka hijau di Jakarta masih dibawah ketentuan UU Penataan Ruang yaitu sebesar 30%. Minimnya RTH menuai problem social, mental, dan fisik warga.		

Ruang Hijau Kurang, Picu Masalah Kota

Penataan Kalijodo Belum Jadi Prioritas Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Luas ruang terbuka hijau di Jakarta memang cenderung naik 15 tahun terakhir. Namun, luasnya jauh lebih rendah dari ketentuan undang-undang tentang penataan ruang sebesar 30 persen. Minimnya ruang terbuka hijau menuai problem sosial, mental, dan fisik warga.

Pegiat ruang terbuka hijau (RTH) dan arsitek lanskap, Nirwono Joga, Rabu (10/2), menyebutkan, luas RTH di DKI Jakarta tahun 1965 masih 37,2 persen, lalu turun menjadi 25,8 persen tahun 1985, dan 9 persen tahun 2000. Sejak itu, jumlahnya bertambah, tetapi relatif kecil, yakni 9,8 persen tahun 2010 dan 9,98 persen tahun 2015.

Menurut Nirwono, penambahan luas RTH dapat dipercepat, antara lain dengan menghijaukan bantaran sungai, rel, area SUTET, dan kolong tol. Penghijauan 44 waduk dan 14 situ di Jakarta serta kawasan rawan kebakaran turut mempercepat penambahan RTH.

Pengajar Program Doktoral Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Negeri Jakarta, Deddy Kurniawan Halim, menambahkan, kekurangan RTH bisa berdampak pada timbulnya masalah sosial, mental, dan fisik warga. Warga bisa menjadi individualis karena kurang tempat bertemu, tertekan karena tidak ada ruang penyembuhan mental, serta sakit secara fisik.

Ruang publik memang tidak melulu RTH. Wujudnya bisa ruang tertutup, seperti mal yang dikuasai swasta dan tidak gratis. Padahal, kata Deddy, hakikat ruang publik adalah gratis dan terbuka bagi semua warga.

Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyasar lahan-lahan baru untuk membangun taman kota, tempat pemakaman umum, dan jalur hijau. Akan tetapi, selalu ada kendala, seperti pembebasan lahan.

Meski sejumlah taman dan ruang publik sudah dibangun, pelibatan masyarakat untuk menghidupkan dan merawat taman masih kurang. Di Taman Tabebuya, Jalan Muhammad Kafi 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan, hampir tidak ada kegiatan yang melibatkan warga setempat.

"Taman ini terletak berjauhan dengan permukiman warga. Di sini tidak pernah ada kegiatan yang melibatkan warga," kata Ahmad (27), petugas keamanan taman dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Umum Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Ahmad, kebanyakan pengunjung Taman Tabebuya berasal dari Jakarta, Depok, dan Bogor. Kedekatan taman itu dengan warga yang tinggal di dekatnya justru kurang. Minimnya kegiatan untuk mengajak warga menghidupkan dan merawat taman membuat petugas keamanan harus bekerja ekstra keras menegur pengunjung yang jahil merusak fasilitas taman. Kondisi serupa terjadi di Taman Jagakarsa tak jauh dari Tabebuya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkomitmen menyediakan lebih banyak taman dan RTH di Jakarta. Menurut Basuki, ketersediaan taman membuat warga lebih mudah berinteraksi dan saling mengenal sehingga tercipta budaya gotong royong di antara masyarakat.

Basuki memerintahkan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Umum DKI Jakarta merekrut warga sebagai petugas keamanan dan kebersihan taman. "Mereka (warga) tahu kondisi taman seperti apa. Keinginan menjaga taman jadi muncul," katanya.

Selain itu, menurut Basuki, taman juga akan dilengkapi toilet dengan pendingin udara dan kamera pemantau (CCTV).

Ukur kekuatan

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian akan mendukung langkah Pemprov DKI yang berniat menata Kalijodo, pusat lokalisasi dan hiburan malam bagi kalangan kelas menengah ke bawah, yang berada di perbatasan antara Tambora, Jakarta Barat; dan Penjaringan, Jakarta Utara. Akan tetapi, Gubernur Basuki justru mengatakan penertiban Kalijodo perlu, tetapi belum menjadi prioritas.

"Kami sedang mengukur kekuatan dulu. Kami pikir belum siap karena harus konsentrasi untuk membereskan Waduk Pluit. Kalau Waduk Pluit sudah selesai, akan kami bereskan itu (Kalijodo). Lagi pula (kawasan) itu enggak terlalu kena sungai. Yang ditamakan (untuk dibongkar) yang kena sungai dan waduk," ujarnya.

Kawasan Kalijodo diapit Kanal Barat dan Kali Item. Menurut Camat Tambora Djaharuddin, kawasan tersebut masuk dalam zona jalur hijau. Di kawasan ini ada rumah permanen warga yang terletak 2 meter-2,5 meter dari jalan inspeksi Kanal Barat. Rumah bercat berwarna-warni itu sebagian besar dipasangi *neon box* bertuliskan merek minuman beralkohol. Kondisi lingkungan di pinggir jalan terlihat bersih dan rapi. Namun, jika masuk ke dalam permukiman, kondisinya gelap dan lembab karena padat penduduk. Kawasan itu ramai pada sekitar pukul 20.00 hingga dini hari.

Maryamah, Ketua RT 007 RW 010 Kelurahan Angke, Tambora, mengatakan, sebagian besar kafe dan tempat hiburan masuk ke wilayah Penjaringan. Hanya ada satu kafe besar yang berada di wilayah Angke. Selain kafe, di tempat itu juga tumbuh subur usaha kontrakan. Kontrakan seharga Rp 300.000-Rp 500.000 disewa oleh tukang parkir, petugas keamanan, dan perempuan yang bekerja di tempat hiburan. Di RT 007 sendiri terdata ada 100 kepala keluarga yang tinggal. Itu di luar para pendatang yang masuk-keluar kawasan itu.

"Rencana pembongkaran bangunan di sini sudah saya dengar sejak zaman Gubernur Sutiyoso. Kami berharap, sih, enggak usah digusur. Kalau tempat hiburan mau ditertibkan, itu terserah pemerintah," kata Maryamah.

(IRE/WIN/FRO/DNA/MKN/DEA)

Judul	**Jalur Pantura Rusak**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Media Indonesia (Halaman 24)		
Resume	Hujan terus menerus dan tonase truk yang melebihi kapasitas mengakibatkan sebagian jalur Pantura-Indramayu		

JALUR PANTURA RUSAK: Pengendara becak menghindari jalanan yang rusak di jalur pantura, Indramayu, Jawa Barat, kemarin. Akibat hujan terus-menerus dan tonase truk yang berlebihan mengakibatkan sebagian jalur pantura Indramayu semakin mengalami kerusakan, berlubang, dan bergelombang sehingga membahayakan pengguna kendaraan.

Judul	**Pemerintah Segera Bebaskan Lahan KA Papua**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Investor Daily		
Resume	Pemerintah akan memulai pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan jalur kereta api di Papua tahun ini. Kemenhub akan mengajukan tambahan dana melalui usulan RAPBN-P 2016 sebesar 10 Miliar untuk pembebasan lahan tersebut.		

Pemerintah Segera Bebaskan Lahan KA Papua

JAKARTA – Pemerintah akan memulai pembebasan lahan keperluan pembangunan jalur kereta api (KA) di Papua pada tahun ini. Untuk itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal mengajukan tambahan dana melalui usulan RAPBN-P 2016 sebesar Rp 10 miliar guna kebutuhan pembebasan lahan tersebut.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko mengatakan, pelaksanaan kajian kelayakan proyek KA trans Papua sudah dilakukan. Oleh sebab itu, pada tahun ini, pihaknya berupaya memulai pembebasan lahan secara bertahap untuk KA trans Papua tahap 1 untuk trayek Sorong-Manokwari dengan rencana panjang rel sejauh 390 kilometer (km).

"Papua untuk FS (*feasibility study*) sudah. Tahun ini pengadaan lahan Sorong-Manokwari. Bujet belum ada. Nanti kami masukkan dalam APBN-P 2016 Rp 10 miliar dulu. Ini inisiasi tanah saja dulu. Kalau tidak terserap repot kan. Itu kalau dapat, lahannya untuk panjang rel 10 km, tapi kami belum tahu harga lahannya," kata Hermanto di Jakarta, Rabu (10/2).

Hermanto pernah mengatakan, beberapa pihak swasta sudah menyatakan minat terhadap pembangunan KA trans Papua. Namun demikian, pemerintah harus menyelesaikan studi kelaikan untuk pembangunan trase. Dia juga mengatakan tender pengoperasian baru bisa dilakukan setelah trase selesai dibangun.

"Karena itu di daerah nonkomersial, jadi akan ada subsidi dari pemerintah, karena kan sifatnya keperintisan. Kita lihat dulu nanti, kalau sudah berkembang baru swasta bisa masuk. Kalau untuk pengoperasian, pemerintah bangun treknya dulu dan siapkan 1-2 set kereta baru bisa tawarkan operasional," katanya.

Sementara itu, setelah menuntaskan kajian kelayakan KA Kalimantan di bagian barat pada tahun lalu, pada 2016 Kemenhub akan melaksanakan kajian kelayakan KA Kalimantan di bagian timur. Hermanto mengaku, pembangunan KA Kalimantan cukup banyak menemui kendala. Salah satunya untuk membuat desain KA, Kemenhub kesulitan mendapatkan konsultan.

"Cuma sedikit konsultan desainer itu tidak sampai 10. Ini ada ketentuannya karena yang ahli mengenai desain ini terbatas. Persoalan lainnya adalah anggaran dan kedua kondisi geografisnya berat. Kalau di Jawa itu tinggal menimbun-nimbun tanah saja, kalau di Kalimantan itu gambutnya berat," ujar dia.

Kendati demikian, Hermanto tetap optimistis, semua kendala untuk pembangunan KA tersebut bisa diatasi secara bertahap. "Pelan-pelan saja. Katakanlah jalur KA Kalimantan panjangnya kurang lebih 2.000 km, kami utamakan saja di timur dan barat dahulu sambil jalan," imbuh Hermanto.

Selain itu, terkait pembangunan KA di Sulawesi, Hermanto menekankan, pemerintah akan terus menambah pembangunan KA tersebut. Pada tahap awal, KA Sulawesi akan melintasi Makassar-Parepare. Pada tahun lalu, Kemenhub sudah menggarap sekitar 20 km lintasan. Pada tahun ini dengan kesiapan dana di APBN 2016 sebesar Rp 250 miliar, Kemenhub berencana setidaknya membangun 10 km rel di lintasan tersebut.

"(Tapi) masih dibahas (untuk penambahan dana). Kalau anggarannya Rp 250 miliar, jika mau cepat, dananya masih kurang. Untuk lahan sendiri sudah 70% dibebaskan untuk panjang lintasan 145 km. Kalau dananya Rp 250 miliar paling dapat panjang lintasan 10 km," terang Hermanto. **(esa)**

Judul	**BPPT: Insinerator Pilihan Akhir**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Kompas (Halaman 14)		
Resume	BPPT menilai penggunaan insinerator adalah suatu hal yang tak dapat dielakkan, karena volume sampah sudah terlalu besar dan harus dikurangi. Penggunaan teknologi termal (pembakaran) termasuk incinerator, adalah langkah pragmatis yang sangat diperlukan dalam situasi kritis penuh sampah. Namun upaya pengurangan sampah dari hulu harus tetap dilakukan, mengingat incinerator hanyalah upaya di hilir.		

SAMPAH

BPPT: Insinerator Pilihan Akhir

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menilai penggunaan insinerator tidak terelakkan dan menjadi pilihan terakhir bagi sejumlah kota besar di Indonesia, terutama DKI Jakarta. Hal itu karena volume sampah sudah terlalu besar sehingga harus segera dikurangi. Namun, mengurangi volume sampah dari hulu tetap tidak boleh ditinggalkan.

Pekan lalu, pemerintah menetapkan tujuh kota percontohan pengelolaan sampah untuk tenaga listrik, yakni DKI Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Semarang, Solo, dan Makassar. Daerah itu kota besar penghasil sampah di atas 1.000 ton per hari dan kota menengah dengan sampah 200-250 ton per hari.

"Teknologi termal (pembakaran), termasuk insinerator, pilihan terakhir," kata peneliti madya bidang persampahan BPPT, Sri Wahyono, di Jakarta, Rabu (10/2). Hal utama mengelola sampah tetap mengurangi volume dari hulu, antara lain rumah tangga dan perkantoran, yang berarti masyarakat terlibat aktif.

Namun, kondisi ideal itu tak bisa diharapkan untuk kota dengan masalah timbunan sampah sangat berat, terutama DKI Jakarta. Tempat pembuangan sampah akhir Bantar Gebang, Bekasi, diperkirakan mencapai kapasitas maksimal dua tahun lagi sehingga Pemprov DKI Jakarta tak bisa lagi mengirim 6.000-7.000 ton sampah per hari ke sana.

Menurut Direktur Pusat Teknologi Lingkungan BPPT Rudi Nugroho, penggunaan insinerator langkah pragmatis yang sangat diperlukan dalam situasi kritis penuh sampah. Insinerasi bagian teknologi termal mengolah sampah yang butuh banyak oksigen dalam prosesnya.

Sementara itu, peneliti Divisi Pencemaran pada Pusat Kajian Hukum Lingkungan Hidup Indonesia (ICEL) Margaretha Quina mengatakan, pemerintah belum punya kebijakan yang betul-betul mendorong pengurangan sampah dari sumbernya. Adapun insinerator lebih solusi di hilir.

Pemerintah didesak mengoptimalkan semangat 3R (*reduce, reuse, recycle*) sesuai UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Langkah lain pemilahan agar pengelolaan sampah bisa lebih bersahabat lingkungan. Pemilahan sederhana antara sampah sisa dapur/pasar dan sampah sulit terurai memberi kesempatan teknologi termal gasifikasi yang lebih ramah lingkungan.

Rudi yakin, emisi akibat pembakaran sampah bisa ditekan hingga batas aman bagi manusia. Salah satunya dengan teknologi *flue gas treatment* untuk menghilangkan polutan.

Menurut Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tuti Hendrawati Mintarsih, teknologi pembakaran yang dimaksud peraturan presiden terkait percepatan penanganan sampah, bisa pirolisis, gasifikasi, dan insinerator. "Tergantung studi kelayakan di setiap kota," katanya. Pirolisis mengubah polimer plastik menjadi bahan bakar cair solar. Gasifikasi memerangkap sampah organik lalu gas metana dipanen sebagai sumber bahan bakar. (ICH/JOG)

Judul	**Penulisan Tak Lazim, Lawang Suryakancana Diresmikan**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Kompas (Halaman 27)		
Resume	Lawang suryakancana yang merupakan gerbang kawasan pecinan (tionghoa) di bogor diresmikan. Ada nama yang tak lazim di gerbang tersebut karena di gerbang tersebut dicantumkan tulisan: Lawang Suryakancana, Kampung tengah, Buitenzorg, Dayeuh Bogor. Penulisan itu merupakan kesepakatan antara komunitas tionghoa, budayawan bogor dan unsur pemerintah. Namun menurut walikota Bogor , kritik terhadap penulisan nama tersebut dapat didiskusikan dan berkemungkinan untuk dirubah. Pemerintah Bogor juga akan menata kawasan pusaka lainnya setelah Lawang Suryakancana ini, yaitu misalnya Kelurahan Empang yang bercirikan hunian warga keturunan Timur Tengah.		

PENATAAN KOTA

Penulisan Tak Lazim, Lawang Suryakancana Diresmikan

BOGOR, KOMPAS — Meskipun penulisan pada papan dipandang tidak lazim, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meresmikan Lawang Suryakancana di ujung Jalan Suryakancana, Bogor, Rabu (10/2).

Penulisan yang tak lazim ialah mencantumkan tulisan Lawang Suryakancana, Kampung Tengah, Buitenzorg, Dayeuh Bogor, dalam satu papan. Penulisan seperti itu menimbulkan tanda tanya, terutama bagi mereka yang tidak mengenal latar belakang Kota Bogor.

Kampung Tengah diyakini merupakan nama lama kawasan yang saat ini adalah Kelurahan Tengah yang dibatasi oleh Jalan Suryakancana. Buitenzorg adalah nama kawasan Kota Bogor di era kolonial. Dayeuh Bogor diduga kuat merupakan nama kawasan yang sudah ada sejak peradaban masyarakat Sunda era Kerajaan Pajajaran.

"Penulisan di papan itu merupakan hasil kesepakatan antara komunitas Tionghoa, budayawan Bogor, dan unsur pemerintah," kata Bima.

Ia menambahkan, pembangunan gerbang dengan corak Tionghoa itu memang sebagai penanda bahwa kawasan sekitar Jalan Suryakancana merupakan pecinan atau hunian dan tempat usaha kalangan Tionghoa.

Bima mengklaim gerbang itu merupakan simbol akulturasi tiga budaya. Yang dimaksud ialah Sunda dalam tulisan Kampung Tengah dan Dayeuh Bogor, kolonial dari tulisan Buitenzorg, dan arsitektur gerbang bernuansa Tionghoa.

Pembangunan gerbang dengan dominasi warna merah dan dua patung macan hitam dan putih didanai dari hibah pemerintah pusat. Dana diberikan kepada kabupaten dan kota yang mengembangkan diri sebagai kawasan pusaka. Dana yang dikucurkan dari pusat senilai Rp 5 miliar untuk tahun anggaran 2015.

Menurut Bima, kritik terhadap penulisan yang dianggap tidak lazim akan didiskusikan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa penulisan di papan diubah dengan yang lebih tepat atau benar.

Lawang Suryakancana terletak di samping Vihara Dhanagun (Kelenteng Hok Tek Bio). Prasarana itu juga berada di seberang Gerbang Utama Kebun Raya Bogor, Jalan Juanda. Kawasan itu merupakan simpang tiga pertemuan Jalan Juanda, Jalan Suryakancana, dan Jalan Otto Iskandar Dinata.

Selain untuk gerbang, dana juga dipakai untuk pembangunan prasarana yang menurut rencana dinamai Lawang Salapan atau gerbang sembilan di trotoar Jalan Otto Iskandar Dinata. Prasarana di depan Tugu Kujang itu masih dalam pembangunan dan berjarak tidak lebih dari 1 kilometer dari Lawang Suryakancana.

Sekretaris Badan Sosial Lintas Agama Kota Bogor Arifin Himawan mengatakan, pembangunan gerbang patut diapresiasi karena merupakan perhatian kepada komunitas masyarakat. Gerbang mengingatkan sekaligus menegaskan bahwa kawasan tersebut adalah pecinan dan milik seluruh warga Kota Bogor.

Pembangunan gerbang, kata Arifin, perlu ditindaklanjuti dengan penataan kawasan agar bebas dari kesemrawutan, penyerobotan pedagang asongan, dan parkir ilegal. Arifin juga mendorong dan mengimbau para pemilik toko di sepanjang Jalan Suryakancana proaktif menata dan mempercantik tempat usaha sehingga kawasan tersebut nyaman dan ramai didatangi pengunjung.

Warga Suryakancana dan pegiat budaya Tionghoa Bogor, Mardi Lim, menilai gerbang itu menampilkan keberagaman. Meskipun bernuansa Tionghoa, unsur Sunda dipertahankan dengan penempatan patung macan putih dan hitam. Biasanya, dalam budaya Tionghoa, patung penjaga didominasi patung singa. Di gerbang juga ada simbol kujang, senjata tradisional Sunda.

Lim mengatakan, kawasan Tionghoa di Jalan Suryakancana atau dahulu Handelstraat lalu Jalan Perniagaan memang akibat kebijakan segregasi oleh kolonial.

Meskipun ada pro dan kontra, Pemerintah Kota Bogor tetap meresmikan Lawang Suryakancana, Rabu (10/2). Pembangunan prasarana di ujung Jalan Suryakancana yang merupakan kawasan pecinan itu memanfaatkan dana pemerintah pusat.

Pemerintah kolonial sempat memindahkan aktivitas kekuasaan di Bogor sehingga membangun Istana Bogor. Pembangunan istana perlu didukung dengan kegiatan penunjang. Daerah Suryakancana dipilih sebagai pusat ekonomi yang kemudian dipercayakan digerakkan oleh komunitas Tionghoa.

Saat era kolonial berakhir, kawasan Suryakancana kembali seperti di era Kerajaan Pajajaran, yakni tempat hidup berbagai komunitas. "Tidak hanya keturunan Tionghoa, tetapi juga warga Sunda dan lainnya," kata Lim.

Kawasan pusaka

Setelah Lawang Suryakancana, pemerintah akan mencoba menata kawasan pusaka lainnya. Misalnya, Kelurahan Empang yang merupakan ciri khas hunian warga keturunan Timur Tengah.

Selain itu, di sekitar Jalan Sinarsing (KI) akan dipromosikan sebagai kawasan tradisional Sunda. Untuk kawasan Eropa atau kolonial, kini masih dipertahankan, antara lain di sekitar Taman Kencana dan pusat kota. (BRO)

Judul	**Bangun Papua dengan Pendekatan Adat**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Media Indonesia (Halaman 5)		
Resume	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT), menggelar rapat koordinasi percepatan pembangunan Papua berbasis adat.		

Bangun Papua dengan Pendekatan Adat

KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT) menggelar rapat koordinasi percepatan pembangunan Papua berbasis adat. Dalam rapat yang dipimpin Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, selaku penanggung jawab Desk Papua, di Kementerian DPDTT, itu dibahas beberapa usulan dari Pemerintah Provinsi Papua kepada Kementerian DPDTT pada 2016.

"Pada intinya, usulan tersebut untuk percepatan pembangunan berbasis wilayah adat yang dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan pendanaan dari Kementerian DPDTT ke kabupaten-kabupaten di Papua," jelas Menteri DPDTT Marwan Jafar, kepada pers di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kantor Staf Khusus Presiden Urusan Papua juga telah menetapkan pendekatan berbasis masyarakat adat. Upaya itu melalui penguatan peran lembaga masyarakat adat sebagai mitra pemerintah di Papua dalam percepatan pembangunan berbasis sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kelembagaan lokal.

"Pendekatan pembangunan yang berbasis wilayah adat merupakan salah satu terobosan yang diusulkan oleh Pemprov Papua dan telah direkomendasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui kajian pembangunan Papua dan Papua Barat," jelas Marwan.

Sementara itu, Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu Kementerian DPDTT, Suprayoga Hadi, menjelaskan terdapat lima wilayah adat di Papua yang memiliki komoditas unggulan. Pertama, wilayah Saireri, dengan komoditas perikanan dan pariwisata; kedua, Mamta dengan komoditas kakao, kelapa, pariwisata; ketiga, Meepago dengan komoditas kopi dan tambang; keempat, Lapago dengan komoditas kopi, buah merah, dan lebah madu; dan kelima, wilayah Haanim dengan komoditas unggulan perkebunan terpadu, perikanan, karet, dan sagu. "Kementerian DPDTT akan membentuk tim lintas ditjen untuk mengoordinasikan rencana aksi percepatan pembangunan Papua," ujarnya.(*/P-3)

Judul	Bencana Masih Intai Daerah	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Media Indonesia (Halaman 25)		
Resume	Curah hujan yang tinggi, air laut pasang, longsor, tanggul jebol, masih menjadi ancaman bencana bagi masyarakat. Ancaman bencana juga masih mengintai masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.		

Bencana masih Intai Daerah

Curah hujan yang tinggi, air laut pasang, longsor, tanggul jebol, masih menjadi ancaman bencana bagi masyarakat.

RENDY FERDIANSYAH

BENCANA banjir dan longsor telah mendera berbagai wilayah di Tanah Air. Akan tetapi, masyarakat dipastikan belum bisa menarik napas panjang karena ancaman bencana masih mengintai.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, meminta masyarakat korban banjir tetap waspada kendati curah hujan sudah berkurang.

Staf Analisis dan Prakiraan BMKG Pangkalpinang Nur Setiawan, kemarin, menyebutkan saat ini curah hujan di Pangkalpinang menurun jika dibandingkan dengan beberapa hari lalu. Namun, masyarakat tetap diminta waspada.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Cilacap Tri Komara Sidhy mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi bencana tanah bergerak dan longsor di beberapa tempat. Kecamatan yang termasuk siaga satu, jelas dia, ialah Karangpucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, dan Dayeuhluhur.

> Kami meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) memperbaiki beberapa tanggul yang terletak di beberapa daerah.

Peringatan juga dikeluarkan bagi warga Kalimantan Tengah. Kepala BPBD Kalteng Brigong Tom Moenandas mengingatkan warga yang hidup di bantaran sungai di Kalteng agar waspada terhadap luapan air sungai yang tiba-tiba.

Di Kalimantan Barat, prakirawan BMKG Supadio Kubu Raya, Deby, menjelaskan berbagai daerah di provinsi itu berpotensi diguyur hujan dengan intensitas lebat, seperti Sambas, Melawi, Kapuas Hulu, Sintang, Ketapang, Kubu Raya, Mempawah, dan Kota Pontianak.

"Curah hujan yang cukup tinggi ditambah air pasang laut menyebabkan daerah itu rawan banjir," katanya.

Di Jawa Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali meminta warga permukiman di bawah Dam Sipendok untuk mewaspadai tanggul yang terancam jebol. Apalagi, saat ini guyuran hujan semakin intensif di atas Gunung Merbabu.

"Seluruh warga harus meningkatkan kewaspadaan. Tim SAR dan relawan kita siapkan dan terus memantau perkembangan," ujar Kepala BPBD Boyolali Nur Khamdani.

Tanggul Kali Plalangan di Kabupaten Lamongan, Jatim, bahkan kembali jebol, kemarin. Padahal, dua hari sebelumnya tanggul itu baru mulai diperbaiki setelah jebol. Akibatnya, air Kali Plalangan menggenanggi dua dusun di Kecamatan Turi.

BPBD Karawang, Jawa Barat, juga meminta perbaikan tanggul rawan jebol di sejumlah wilayah Sungai Citarum dan Cilamaya. "Kami meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) memperbaiki beberapa tanggul yang terletak di beberapa daerah, yakni Cikelor, Blok Tangkil, Lolohan Amblas, Tambunsari, Kampung Tengah, Blok Kramat, Kalentemu, dan Cilamaya Wetan," ungkap Sekretaris BPBD Karawang Supriatna.

Menurut Supriatna, kerusakan tanggul bervariasi dari sepanjang 40 meter hingga 4 meter. Selain itu, terjadi penipisan tanggul hingga 3 meter.

Masih banjir

Banjir merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Proses evakuasi disiapkan jika ketinggian air terus naik. "Ada sekitar 700 rumah warga yang terendam banjir di empat desa di Kecamatan Kandanghaur," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Indramayu Edi Kusdiana.

Menurut Edi, banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Akibatnya, Kali Prawan yang melintas di wilayah tersebut meluap.

Sementara itu di Kota Bengkulu, Bengkulu, sedikitnya 40 rumah warga terendam banjir sekitar 35 cm setelah hujan deras terjadi selama dua hari terakhir.

Yanto, 45, warga Kelurahan Tanjung Agung, Bengkulu, mengatakan selain curah hujan, banjir juga disebabkan pintu air yang tidak berfungsi untuk menyedot air, ditambah pasang naik di muara Sungai Bengkulu.

Di Kota Kembang, curah hujan di kawasan Bandung Selatan yang tinggi selama tiga hari terakhir membuat sejumlah kawasan di Kecamatan Baleendah terendam banjir setinggi 60 cm.

"Ada kampung yang terendam banjir, yakni di Cieunteung, Cigosol, dan Andir dengan ketinggian 60 cm," ujar Kapolsek Baleendah Komisaris Suhari.

Akan tetapi, lanjut dia, warga di tiga kampung itu belum mau mengungsi. (Tim/Ant/N-2)

rendy@mediaindonesia.com

DAMPAK BANJIR BINJAI: Warga berjalan di dekat puing-puing bangunan pascabanjir yang terjadi di Jalan Imam Bonjol, Binjai, Sumatra Utara, kemarin. Banjir yang terjadi akibat luapan Sungai Mencirim pada Senin (8/2) itu menyebabkan sedikitnya tujuh rumah rusak parah di kawasan tersebut.

Kurang Diperhatikan Korban Banjir Demonstrasi

KORBAN banjir di Muaro Labuah, Solok Selatan, Sumatra Barat, berunjuk rasa karena merasa tidak diperhatikan oleh pihak terkait.

Wali Nagari Pasa Muaro Labuah Rahman di lokasi, kemarin, mengatakan masyarakat Pasa Muaro Labuah berunjuk rasa karena sudah tiga hari tidak diperhatikan. "Selama tiga hari, kita baru dapat 300 bungkus nasi. Padahal, korban lebih kurang 2.000," ujarnya.

Setelah unjuk rasa warga, sambung dia, dapur umum didirikan oleh dinas sosial setempat. "Hari ini baru berdiri dapur umum. Sebelumnya, ya menahan lapar. Atau menggunakan alat masak yang masih terselamatkan," jelasnya.

Penjabat Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek mengungkapkan telah meminta bantuan helikopter untuk menyalurkan bantuan logistik ke daerah bencana yang terisolasi.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyiapkan satu unit helikopter," terang dia.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi mengatakan korban banjir di Kota Pangkalpinang yang sudah terdata mencapai 4.244 orang tersebar di 13 titik tempat penampungan.

Meskipun demikian, dia mengaku belum menerima data korban banjir di tiga kabupaten, sehingga dia memperkirakan korban banjir mencapai 10 ribu orang. "Satu dari 4.200 korban banjir meninggal karena terseret arus," kata Rustam di Pangkalpinang.

Ia menjelaskan banjir itu tidak hanya terjadi di Kota Pangkalpinang, tetapi juga terjadi di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan.

Wali Kota Pangkalpinang M Irwansyah mengatakan korban banjir di enam kecamatan di Kota Pangkalpinang membutuhkan air bersih, seragam, dan buku sekolah.

Berbagai bantuan mengalir untuk korban banjir Pangkalpinang, termasuk Jasa Raharja cabang Pangkalpinang yang memberikan layanan kesehatan dan bantuan di dua kecamatan.

Kepala Jasa Raharja Cabang Pangkalpinang Hidayat mengatakan dua kecamatan yang diberi layanan kesehatan dan bantuan ialah Kecamatan Pangkalbalam dengan korban 516 jiwa, sedangkan Kecamatan Grunggang dengan korban 880 jiwa.

Hidayat berharap pelayanan kesehatan dan bantuan berupa pakaian, susu, serta air bersih dapat bermanfaat meringankan beban para korban banjir.

Dari Sidoarjo, Jawa Timur, setelah lima hari, sejumlah daerah terendam banjir, warga yang menjadi korban mulai terkena sakit kulit. (YH/RF/HS/OL/Ant/N-2)

Judul	**Rel Belum Tiba di Makassar**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Media Indonesia (Halaman 24)		
Resume	Pembangunan jalur Kereta api trans Sulawesi tahun ini masih pada tahap pembangunan konstruksi jalur Barru-Parepare. Pembebasan lahan akan dimulai tahun ini.Pembangunan ditargetkan selesai pada 2018 namun bergantung pada ketersediaan dana.		

Rel belum Tiba di Makassar

Pembangunan rel KA dari Makassar ke Parepare ditargetkan rampung pada 2018. Namun, hal itu bergantung pada ketersediaan anggaran.

Lina Herlina

PEMBANGUNAN jalur kereta api (KA) trans-Sulawesi tahun ini masih pada tahap pembangunan konstruksi jalur Barru-Parepare. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KA trans-Sulawesi Henry Hidayat, di Makassar, kemarin, memaparkan pembangunan jalur ke Makassar dilakukan sesuai jalur Barru-Parepare. "Jika ini selesai baru bergerak dari Barru ke Makassar," kata dia.

Ia melanjutkan pembebasan lahan jalur Barru menuju Makassar akan dimulai tahun ini. Untuk 2016, pembangunan KA trans-Sulawesi mendapat Rp268 miliar, dengan estimasi Rp121 miliar untuk konstruksi, Rp70 miliar untuk pengadaan, dan Rp77 miliar untuk pembebasan lahan.

"Dana konstruksi digunakan untuk konstruksi tiga jembatan dan penyelesaian *flyover* di Pekkae, Kabupaten Barru. Kami juga sedang mengusulkan di APBN-P 2016, dengan harapan sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo, ada tambahan dana sebesar Rp2 triliun," terang dia.

Secara keseluruhan, pembangunan dan pengadaan rel kereta api di Sulsel atau trans-Sulawesi dari Makassar ke Parepare ditargetkan rampung pada 2018. "Akan tetapi, ya, semua memang tergantung ketersediaan anggaran yang turun," tandasnya.

Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel Agus Arifin Nu'mang berharap anggaran pembebasan lahan Rp200 miliar yang tidak terserap pada 2015 dapat dianggarkan kembali pada 2016.

Jalan rusak

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, menagih janji pelaksana proyek jalan Tol Pejagan-Brebes untuk segera memperbaiki ruas jalan protokol yang rusak akibat pembangunan jalan tol.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemkab Brebes Nuhsy Mansyur menjelaskan, dari hasil pengecekan di lapangan, sebagian besar kondisi jalan di Brebes rusak akibat proyek jalan Tol Pejagan-Brebes Timur dan belum ada yang diperbaiki secara permanen.

"Kalau sesuai perjanjian yang telah ditandatangani bersama antara Pemkab Brebes dan PT Pejagan-Pemalang Tol Road (PPTR), tercatat ada 12 ruas jalan yang perbaikannya menjadi tanggung jawab pelaksana tol," ujar Nuhsy.

Nuhsy menyebut hingga saat ini baru ada satu ruas jalan, yakni di Pebatan-Rengaspendawa, yang mulai diperbaiki secara permanen. Itu pun belum seluruh ruas jalan yang rusak diperbaiki, hanya sekitar 1,8 kilometer. Padahal, sesuai pengecekan lapangan dan kesepakatan bersama, kerusakan di ruas tersebut mencapai 3 kilometer.

Di Cilacap, Jawa Tengah, Rp53,96 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan untuk 11 paket kegiatan peningkatan jalan sepanjang 58 km lebih.

Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Cilacap A Ristiyanto mengatakan DAK untuk infrastruktur di Cilacap meningkat signifikan karena tahun sebelumnya Rp16 miliar lebih untuk 14 paket kegiatan.

"Alokasi tahun ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk jalan-jalan utama di Cilacap," jelas Ristiyanto.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menegaskan pemkab terus menggenjot perbaikan infrastruktur jalan. "Kami telah mencanangkan, pada 2017 mendatang, Cilacap bebas jalan berlubang sehingga akses jalan bakal lebih memudahkan warga serta roda perekonomian bisa meningkat," kata Tatto. (JU LD/N-2)

lina@mediaindonesia.com

Judul	**Kemacetan Makin Parah**	Tanggal	Kamis, 11 Februari 2016
Media	Media Indonesia (Halaman 24)		
Resume	Kemacetan terlihat di saat jam sibuk di samping pembangunan jalan laying khusus bus transjakarta di koridor ciledug-tendean. Hal itu karena tidak adanya pengatur jalan di area tersebut.		

Kemacetan Makin Parah

Antrean kendaraan terlihat saat jam sibuk di samping pembangunan jalan layang khusus bus TransJakarta Koridor XIII Ciledug-Kapten P Tendean di Jalan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (10/2). Kemacetan parah kerap terjadi akibat tidak adanya petugas pengatur di jalur tersebut.